



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 1 Februari 2021
Pukul	:	11.05 WIB - 14.52 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	:	H. Bambang Kristiono, S.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi pencapaian kinerja Kemkominfo di Tahun 2020;2. Realisasi anggaran Kemkominfo di Tahun Anggaran 2020;3. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021;4. Isu-isu aktual, antara lain mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan perkembangan transformasi digital dan penyusunan digital, <i>roadmap</i> serta realisasinya; sertab. Peran strategis dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua.
Hadir	:	PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Meutya Viada Hafid (F-PG)2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Charles Honoris
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Dr. H.M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
20. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
21. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

22. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
23. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. Fadhlullah, S.E.
26. R. Imron Amin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Muhammad Farhan
29. Kresna Dewanata Phrosakh
30. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
31. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

32. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
33. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
35. A. Helmy Faishal Zaini
36. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

37. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
38. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
39. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
40. H. Anton Sukartono Suratno, M.Si.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

41. H. Sukamta, Ph.D.
42. KH. Toriq Hidayat, Lc.
43. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

44. Ir. Alimin Abdullah
45. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
46. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
47. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

48. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S.
49. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

- Anggota yang Izin : 1. Nurul Arifin, M.Si. (F-PG)
2. Sugiono (F-GERINDRA)
3. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)
- Undangan : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate, S.E.
Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Senin, 1 Februari Tahun 2021.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Taala Wabarakaatuh.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Sekjen DPR-RI Nomor SJ/01026/SETJEN DPR-RI/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, perihal Penyampaian Tata Cara Rapat-rapat dan Kunjungan kerja komisi/badan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dalam lampiran surat, antara lain dijelaskan bahwa pembatasan kehadiran fisik pada rapat-rapat komisi/badan dengan ketentuan 20% dari jumlah anggota komisi badan, dengan tetap memperhatikan lampiran surat Ketua DPR-RI Nomor PW/10736/DPRRI/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/Badan pada Masa Tatanan Normal Baru. Pembatasan kehadiran fisik mitra kerja pada rapat-rapat di DPR-RI dengan ketentuan paling banyak juga sama 20% dari kapasitas tempat duduk pada ruang rapat komisi ataupun Banggar.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, telah hadir dalam rapat kita pada hari ini 24 orang anggota, masing-masing 12 orang anggota hadir secara fisik dan 12 anggota hadir secara virtual, dari 8 fraksi yang ada. Selanjutnya, rapat pada hari ini Pak Menteri, kita laksanakan secara terbuka atau tertutup? Baik. Saya kira terbuka aja ya? Jadi rapat saya nyatakan dilaksanakan secara terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Mengacu pada tupoksi, Kementerian Kominfo merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sejumlah program strategis diemban oleh Kementerian Kominfo, antara lain penyediaan infrastruktur TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, komunikasi publik dan program-program lainnya. Guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut di tahun anggaran 2020 dan perencanaannya di Tahun Anggaran 2021.

Maka dalam Rapat Kerja pada hari ini Komisi I DPR-RI ingin mendapatkan penjelasan dan Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hal-hal sebagai berikut; yang pertama evaluasi pencapaian kinerja Kemkominfo di tahun 2020, yang kedua realisasi anggaran Kemkominfo di tahun anggaran 2020, yang ketiga persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2021, kemudian yang ke-4 adalah isu-isu aktual yang antara lain mengenai laporan perkembangan transformasi digital dan penyusunan digital, *roadmap* serta *roadmap* serta realisasinya serta peran strategis dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua.

Sebelum kami mempersilakan Saudara MenKominfo menyampaikan paparannya, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan pergantian keanggotaan dari fraksi-fraksi yang berada di Komisi I DPR-RI, yaitu yang pertama untuk anggota baru, ada Saudara Hasbi Anshory dari Fraksi Partai Nasdem, yang saya dengar hari masih ada kunjungan ke luar negeri, begitu. Kemudian yang kedua Saudara Anton Sukartono Suratto dari Partai Demokrat.

Terima kasih Pak Anton.

Kemudian anggota yang pindah dari Komisi I ke komisi lain ada 3 orang, yang pertama Saudara Willy Aditya dari Partai Nasdem, berpindah ke Komisi XI, yang kedua Saudara Hasan Saleh dari Fraksi Partai Demokrat pindah ke Komisi IX, kemudian Saudara Haji Abdul Kadir Karding dari Fraksi Partai PKB, pindah ke Komisi VII.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan rapat kerja kita pada hari ini. Waktu kami persilakan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Shalom.

Yang Saya hormati Ketua dan para Pimpinan Komisi I, secara khusus Pimpinan Rapat kita hari ini,

Yang Saya hormati para Anggota Komisi I DPR RI,

Baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara fisik hari ini, dan yang barangkali sedang melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Mengawali kegiatan hari ini, patut dan pantas lah kita menghatur puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini tanggal 1 Februari 2021, kita dapat melakukan rapat kerja kembali untuk pertama kalinya di tahun ini.

Saya secara pribadi terlebih dahulu pasti ingin menyampaikan salam sehat bagi kita sekalian, salam, agar kita semuanya aman dari pandemi Covid-19 dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik.

Sekaligus memanfaatkan kesempatan ini, menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal bagi rekan-rekan Nasrani, dan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Teriring doa semoga Tahun 2021 ini membawa banyak kekuatan bagi bangsa kita untuk mengatasi Covid-19 dan membawa banyak rezeki untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat kita. Serta bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan Tahun Baru *Sincia*, saya juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru dengan harapan bahwa Tahun Baru *Sincia* kali ini, juga dirayakan dengan sungguh sungguh memperhatikan tata cara protokol kesehatan yang di tetapkan bersama. Ah, juga *angpau*, ya. Rupanya pancingan pertamanya, sambung ini.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan, juga, ya, memperkenalkan Sekjen Kominfo yang baru, Ibu Mira Tayyiba menggantikan Ibu Niken, yang saat ini, Ibu Mira yang menggantikan Ibu Niken. Kalau Ibu Niken saat ini menjadi Staf Khusus MenKominfo dan Pak Hary Budiarto, dokter Hary Budiarto sebagai Kepala Badan Litbang SDM yang baru, Pak Hary. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Ibu Mira dan Pak Hary, tetap melanjutkan kerjasama dan kerja besar antara Kominfo dan Komisi I DPR-RI untuk melaksanakan amanat dan tugas-tugas yang diemban bersama.

Sesuai dengan undangan dari Wakil Ketua DPR-RI Bidang Koordinator Politik Dan Keamanan Nomor PW 01213/ DPR-RI/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang lalu, perihal

tentang rapat kerja dengan agenda hari ini, seperti tadi disampaikan oleh pimpinan rapat, yang pertama membahas tentang evaluasi pencapaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020, yang kedua realisasi anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2020, yang ketiga persiapan dan kesiapan APBN Tahun 2021, dan yang ke-4 pembahasan isu-isu aktual terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo, terutama mengenai peran strategis Kementerian Kominfo dalam mendorong transformasi digital dan penanganan pandemi Covid-19.

Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, kalau bisa ditayangkan *slide* ketiga.

Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Dewan yang Saya hormati,

Pada Tahun 2020 yang lalu, fokus utama Kementerian Kominfo adalah untuk memperkuat konektivitas digital serta menciptakan ruang komunikasi publik yang selalu sehat dan produktif. Upaya tersebut diturunkan atau diuraikan ke dalam 4 program strategis Kominfo meliputi: yang pertama, penyediaan infrastruktur teknologi; yang kedua, pengelolaan pos dan informatika; yang ketiga, pemanfaatan teknologi; serta yang keempat, komunikasi publik.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam program-program tersebut di antaranya sebagai berikut: program penyediaan infrastruktur teknologi. Kementerian Kominfo memperkuat infrastruktur telekomunikasi, sekaligus infrastruktur data secara simultan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya pembangunan 1.682 *base transceiver stations/BTS*, khususnya di wilayah-wilayah 3T Indonesia. Yang kedua, penyediaan 11.817 akses internet di fasilitas publik. Ketiga ya, pengadaan lahan pusat data nasional. Dan yang keempat pembaharuan sistem pemancar digital TVRI, pemancar TV Digital TVRI di 34 lokasi, untuk mendorong proses digitalisasi televisi *analog switch off*. Dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka digitalisasi tv berlaku, ya atau *analog switch off* akan berlaku mulai tanggal 2 november tahun 2022, disyaratkan di dalam undang-undang tersebut, 2 tahun sejak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Menjadi kewajiban bagi kita untuk mensukseskan proses digitalisasi TV melalui multiplexing untuk meningkatkan digital dividen Indonesia, dalam hal ini spektrum frekuensi, mengingat nilai ekonomi yang signifikan. Terdapat 119 mega hertz frekuensi digital dividen. Saat ini Kementerian Kominfo sedang dalam tahapan persiapan seleksi.

Melalui program pengelolaan pos dan informatika, Kementerian Kominfo melakukan penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 30 mega hertz untuk memperkuat konektivitas digital nasional kita melalui program pemanfaatan teknologi untuk penciptaan ruang digital yang lebih produktif. Kementerian Kominfo melakukan pelatihan terhadap 58.000 talenta digital. Literasi lebih dari 200.000 penduduk melakukan proses stek daun atau pemblokiran terhadap lebih dari 2 juta konten negatif di dalam ruang digital kita, serta mengembangkan 20 perusahaan *start-up* atau rintisan digital baru. Kementerian Kominfo bersama dengan DPR-RI juga terus mendorong percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi. Kita sama-sama mengetahui bahwa pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang sedang berlangsung di dalam Panja bersama Komisi I DPR-RI yang sampai saat ini telah membahas 145 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM. Indonesia saat ini sangat membutuhkan RUU PDP khususnya untuk menjadi rujukan bagi berbagai kerjasama internasional.

Di Asean sendiri, saya baru saja selesai rapat Menteri ICT atau Menteri Kominfo Asean bersama mitra-mitra kerjanya, Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan *International Telecommunication Union*, yang salah satunya membicarakan terkait dengan data pribadi dan pergerakan data lintas batas negara.

Dari banyak negara di Asean, Indonesia salah satu yang tentu diharapkan untuk dapat segera menyelesaikan Undang Undang PDP atau yang disebut dengan *General Data Protection Regulations*, untuk memastikan perlindungan data masyarakat secara khusus pergerakan data lintas batas negara.

Yang keempat, melalui program komunikasi publik, Kementerian Kominfo melakukan diseminasi informasi terkait program prioritas pemerintah kepada lebih dari 197,5 juta masyarakat. Termasuk informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang menysasar sekitar 105 juta masyarakat. Kementerian Kominfo juga membangun jaringan komunikasi akar rumput melalui inisiasi petugas informasi publik di 500 kecamatan prioritas yang meliputi daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang Saya hormati,

Sepanjang Tahun 2020 hingga saat ini, Kementerian Kominfo melakukan upaya penyediaan teknologi guna mendukung upaya bersama percepatan penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan melalui pengembangan berbagai *platform* teknologi termasuk aplikasi Peduli Lindungi serta Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19.

Kementerian Kominfo juga melakukan penyediaan atau *deployment* akses internet cepat di 3.126 titik fasilitas layanan kesehatan atau yang disebut dengan fasyankes. Melengkapi total 13.011 titik fasyankes di Indonesia untuk mempercepat penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi sampai pada pemanfaatan atau penerbitan sertifikat vaksinasi secara digital. Penggelaran akses internet ini berhasil diselesaikan pada Tahun 2020.

Para Anggota yang terhormat,

Dapat kami informasikan, terhadap fasilitas layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, sedianya jika itu dilakukan secara biasa-biasa saja, maka baru bisa diselesaikan tahun 2027. Namun akibat atau dampak dari pandemi Covid-19, Kominfo melakukan akselerasi penyediaan akses internet terhadap seluruh fasyankes untuk mendukung penanganan Covid-19. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, atau dengan kata lain dengan selesainya 3.126 fasyankes dilengkapi dengan akses internet per tanggal 24 Desember 2020 yang lalu, maka penyelesaiannya maju 7 tahun dari rencana semula. Ternyata Indonesia mampu melakukannya dalam waktu satu kuartal atau kuartal keempat Tahun 2020 yang lalu.

Guna memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi, sekaligus mendukung pelaksanaan program vaksinasi agar berjalan lancar dan tepat sasaran, Kominfo dan Kementerian Kesehatan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama pada tanggal 12 Januari 2021 yang lalu. Melalui SKB ini Kementerian Kominfo diberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap 3 hal. Yang pertama, integrasi aplikasi Peduli Lindungi ke dalam sistem informasi Satu Data Covid-19 atau SISD vaksinasi Covid-19. Yang kedua, melakukan *mirroring* data dengan sistem pusat data nasional yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi yang aman dan handal. Untuk itu Kementerian Kominfo, Menteri Kominfo telah menerbitkan beberapa keputusan menteri untuk memastikan terjaganya atau terlindunginya data-data masyarakat.

Selain itu perlu kami sampaikan pula bahwa dalam mensukseskan program vaksinasi nasional Covid-19, Kominfo telah mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 4,7 juta pengguna dan chat box whatsapp vaksinasi yang sampai saat ini telah mengirimkan lebih dari 63, lebih dari 6 juta pesan ke seluruh penggunanya.

Disamping menyediakan dan mengembangkan teknologi, peranan nyata Kementerian Kominfo dalam penanganan Covid-19 juga dilakukan melalui penguatan komunikasi publik

pemerintah. Sepanjang tahun 2020 yang lalu, Kementerian Kominfo menggerakkan komunikasi publik khususnya terkait kampanye vaksinasi dalam 9 lini yang beragam. Inisiatif ini akan terus diperkuat pada tahun 2021, dengan memanfaatkan jalur-jalur media secara komprehensif dan inovatif baik di ranah digital maupun non digital.

Kepada Anggota Komisi I yang terhormat,

Sekalian ingin saya juga sampaikan, sejak dibubarkannya Departemen Penerangan, tugas-tugas komunikasi publik telah dilakukan secara desentralisasi atau dilakukan masing-masing oleh sektor masing-masing kementerian dan lembaga, dan bahkan oleh pemerintah daerah. Kominfo bertugas untuk melakukan orkestrasi komunikasi publik. Karena yang selama ini komunikasi publik lebih didominasi secara sektor oleh kementerian dan lembaga.

Khusus menyangkut, khusus menyangkut Covid-19, saat ini terdapat 2 jalur komunikasi publik. Yang pertama komunikasi publik yang berkaitan dengan kesehatan dan pandemi itu sendiri, dilakukan oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Nah yang menyangkut pemulihan ekonomi nasional, dibantu dan diperkuat oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan komunikasi publiknya. Hal itu juga tergambarkan dari keseluruhan potret dan proyeksi pembiayaan terhadap komunikasi publik pemerintah. Singkatnya ada 2 jalur komunikasi publik, pemulihan ekonomi, dan penanganan masalah kesehatan Covid-19 dengan sektor dan tekanan yang berbeda masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program Kementerian Kominfo turut didorong oleh tata kelola anggaran yang efektif dan *prudent*. Sejak Tahun 2018 angka realisasi anggaran Kementerian Kominfo terus meningkat. Di mana Tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 94,8% dari pagu dan meningkat menjadi 97,4% di Tahun 2019. Tahun ini realisasi Tahun 2020 ini, realisasi anggaran Kementerian Kominfo mencapai 98,2% dengan nilai sebesar Rp7,94 triliun dari total pagu Rp 8,09 triliun. Tahun 2020 ada peningkatan atau realokasi dan refocusing anggaran Kominfo yang cukup signifikan, jika diperbandingkan dengan anggaran awal yang ditetapkan di APBN tahun 2020.

Dari tahun ke tahun, tren target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat. Hal ini dihasilkan oleh karena adanya ekstensifikasi dan intensifikasi PNBPN berupa lelang spektrum frekuensi. Sesuai dengan hasil rapat panitia kerja pada 10 September Tahun 2020, target PNBPN Tahun 2021 dinaikkan dari target awal sebesar Rp21,55 triliun menjadi Rp23,909 triliun atau ada kenaikan sebesar Rp2 triliun setara dengan 11%. Melalui peningkatan tersebut, akan dituangkan dalam izin penggunaan sebagian PNBPN untuk kepentingan anggaran dalam pembiayaan upaya percepatan transformasi digital Indonesia. Sebagai ilustrasi, Kementerian Kominfo merupakan salah satu penghasil PNBPN tertinggi pada sektor non migas. Selama kurun waktu 2015 sampai 2020, kontribusi total kepada negara sebesar Rp106,11 triliun. Dengan catatan bahwa kontribusi tersebut hanya berasal dari PNBPN non BLU.

Terkait persiapan pelaksanaan APBN tahun 2021, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25,8 triliun, yang Bapak-Ibu anggota Komisi I sekalian mengetahuinya. Pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2021, telah dialokasikan sebesar Rp16,5 triliun. Sementara dalam rangka program vaksinasi nasional secara berkala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kominfo pada tahun 2021 mengalami *refocussing* sebesar Rp860 miliar menjadi sebesar Rp16,9 triliun. Atau turun dari Rp16,95 triliun, ya, menjadi Rp16,09 triliun. Sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp8,12 triliun atau 8 triliun 120 miliar.

Terkait dengan dukungan penanganan Covid-19 dan pemenuhan ekonomi nasional, Kementerian Kominfo juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun dengan rincian Rp1,34 triliun untuk komunikasi publik, dan Rp779 miliar untuk akses internet fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan yang tadi disebutkan, fasyankes baru.

Bapak-Ibu Anggota Komisi I yang Saya hormati,

Sebagai *background*, pada saat penyusunan APBN Tahun 2021, asumsi dasar APBN itu adalah Covid-19 melandai. Namun realitanya, pada saat awal Tahun 2021, atau sejak akhir Tahun 2020, justru Covid-19 di Indonesia belum melandai, bahkan terjadi peledakan yang lebih tinggi. Dan karenanya dibutuhkan realokasi dan refocussing anggaran terkait Covid-19 dan secara khusus menyangkut komunikasi publik. Untuk itu, ditambahkan, kebutuhan komunikasi publik untuk Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp2,12 triliun, yang saya sebutkan tadi.

Sedangkan kebutuhan untuk kepentingan pemanfaatan 3.126 fasyankes, dibutuhkan tambahan dana sebesar Rp779 miliar yang juga dilakukan pembangunan ini setelah APBN Tahun 2021 disahkan pada bulan Oktober yang lalu. Karena pembangunan fasyankes, akses internet fasyankes ini dilakukan di kuartal ke-4 tahun 2020.

Dengan demikian terdapat kekurangan pada anggaran Kementerian Kominfo tahun anggaran 2021 sebesar Rp10,25 triliun. Sebagai informasi, saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran tersebut. Pembicaraan kekurangan anggaran ini dilakukan terus bersama Kementerian Keuangan, mengingat bahwa kebutuhan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK dalam rangka mendukung digitalisasi Indonesia, juga menempati prioritas yang sangat tinggi. Di sisi yang lain, Menteri Keuangan juga memperhatikan tekanan penerimaan fiskal dan kebijakan-kebijakan fiskal lainnya.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Program-program prioritas Kementerian Kominfo Tahun 2021 terdiri dari 5 program utama, diantaranya yang pertama, melanjutkan program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, program penataan, pengelolaan pos dan informatika. Keempat, program komunikasi publik, serta tata kelola kebijakan dan regulasi.

Dari berbagai program prioritas tersebut, dapat kami sampaikan informasi terkait kesiapan beberapa program prioritas, diantaranya: yang pertama, pembangunan BTS 4G. Telah ditandatangani kontrak BTS 4G pada tanggal 29 Januari 2020, beberapa hari yang lalu, untuk paket 1 yang terdiri dari 1.364 desa dan kelurahan dan paket 2 yang terdiri dari 1.336 desa dan kelurahan. Sementara itu terkait pengadaan paket 3, 4, dan 5, ditargetkan atau kita harapkan kontrak dapat ditandatangani pada akhir Februari 2021. Sebagai informasi, paket 1 dan 2 itu meliputi keseluruhan wilayah 3T non Papua dan Papua Barat, atau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, Maluku dan Maluku Utara. Paket 3, 4, dan 5, khusus menyangkut wilayah Papua. Direncanakan, sepanjang tahun 2021, akan dibangun sebanyak 4.200 BTS untuk melayani 4.200 desa dan kelurahan yang belum memiliki atau belum tersedia *coverage* 4G internet di sana. Penyediaan akses internet pada tahun 2021 akan dilakukan di 7.904 desa dan kelurahan. Pemetaan lokasi penyediaan akses internet telah dilakukan, dan saat ini tengah dilaksanakan pengadaan *ground segment*. Kontrak ditargetkan ditandatangani pada akhir Februari tahun 2021. Pada tahun 2021 juga akan dilakukan pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi, untuk pengukuran *quality of service* (QoS) dan *quality of experience* (QoE) di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sampai dengan Januari 2021, telah dilakukan lelang pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi.

Jadi terkait dengan tata kelola dan manajemen *bandwidth*, yang selama ini dependensi terhadap operator selular, perlahan-lahan ingin, ya, dipindahkan kepada pemerintah melalui Kominfo untuk melakukan tata kelola *bandwidth* yang lebih efisien dan lebih bermanfaat bagi sebaran kehidupan atau tempat tinggal masyarakat di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini pula ditargetkan akan dibangun satu pusat data nasional untuk kepentingan *electronic government*. Hingga Januari 2021, telah dilakukan finalisasi penandatanganan *financial protocol* oleh Kementerian Keuangan. Dapat saya sampaikan bahwa setelah disediakan data lahan untuk pusat data, maka proses selanjutnya pembiayaan pembangunan pusat data nasional akan dilakukan melalui fasilitas pembiayaan ekspor kredit dari *donor country*. Yang kita harapkan, *financial protocol*-nya bisa diselesaikan segera, antara negara pemberi atau *donor country* dengan Indonesia. Dalam hal ini dilakukan melalui Kementerian Keuangan, sehingga pembangunan pusat data dapat dilakukan. Seperti sebelumnya, telah kami sampaikan, dalam rangka *electronic government*, saat ini Indonesia, atau saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.900 pusat data, untuk melayani kebutuhan pemerintahan. Dan diantaranya hanya sekitar 3% saja yang memenuhi *global standart*. Sehingga terdapat begitu banyak kendala, untuk melakukan Satu Data Indonesia. Untuk itu Kominfo melakukan *interoperabilitas* dan *cleaning* serta *cleansing data*. Namun karena data-data center atau pusat data dan server yang ada di pemerintah dan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi standar global, maka kendala itu pasti luar biasa besarnya. Dan saat ini pula, pemerintah, pusat dan daerah, mempunyai 24.700 aplikasi, sehingga pemanfaatan dan penggunaan APBN menjadi, atau perlu dilakukan lebih efisien. Dengan dilakukan pembangunan Pusat Data Nasional dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia, dan merancang super aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.

Secara khusus, pembahasan RUU PDP pada Januari 2021, telah dilakukan rapat lanjutan sebanyak 2 kali antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI, untuk membahas materi Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU tentang PDP, pada cluster DIM Usulan Perubahan Substansi. Kami tentu berharap ya, pembahasan RUU PDP antara Pemerintah, Kominfo, dan DPR RI Komisi I bisa dilakukan, dan diselesaikan, mengingat begitu pentingnya kebutuhan perlindungan data pribadi seperti tadi kami sebutkan. Sedangkan pembangunan Pusat Data Nasional berbeda sama sekali, karena itu demi kepentingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Agenda terakhir pada rapat hari ini adalah pembahasan isu-isu aktual bidang komunikasi dan informatika. Kami sampaikan perkembangan, yang pertama, telah dilakukan penyusunan Peta Jalan Indonesia digital 2021-2024. Yang saat ini sudah disusun dan sedang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Secara garis besar, Peta Jalan Indonesia Digital Indonesia 2021-2024 ini memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi pelaksanaan, dan target capaian untuk transformasi digital Indonesia di 4 sektor strategis, satu, infrastruktur digital, dua, pemerintahan digital, yang ketiga ekonomi digital, dan yang keempat, masyarakat digital.

Penyusunan peta jalan ini melibatkan mitra-mitra Kementerian Kominfo termasuk kementerian/lembaga terkait, perwakilan sektor swasta, dan masyarakat. Saat ini secara paralel, dokumen tersebut kami seperti yang disampaikan tadi, telah menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk mendapat arahan atau petunjuk kebijakan lebih lanjut, sebelum itu nanti disampaikan pada publik.

Peta Jalan Indonesia 2021-2024 disusun berdasarkan 5 arahan Bapak Presiden, menyangkut percepatan transformasi digital Indonesia. Arahan kebijakan ini diterjemahkan ke dalam 4 arah strategis yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 sektor strategis. Arahan strategis di tiap sektor tersebut diturunkan menjadi rincian-rincian inisiatif strategis yang lebih spesifik, untuk mempermudah pelaksanaannya di kemudian hari. Sebagai catatan, di dalam

pembuatan inisiatif strategis ini, Kementerian Kominfo berusaha untuk mencapai berbagai bidang secara komprehensif. Hal ini dilakukan sebagai upaya membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong realisasi transformasi digital Indonesia. Di dalamnya tidak kurang dari 100 kegiatan yang harus dilakukan.

Kemudian isu terkait peran strategis Kementerian Kominfo dalam upaya dukungan penanganan pandemi Covid-19 gelombang kedua, beberapa hal telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo diantaranya, penambahan fitur registrasi vaksin dan sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi, berupa registrasi penerima vaksin dan akan keluar sertifikat vaksin secara digital di dalam aplikasi. Sebagai contoh saja, pada tanggal, 2 minggu yang lalu, saya melakukan vaksinasi pertama, dan pada saat vaksinasi itu, langsung ada informasi terkait dengan vaksinasi di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Dan tadi melakukan vaksinasi yang kedua, dan secara digital, sertifikatnya akan dikeluarkan di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini telah ada di appstore untuk iOS dan playstore untuk android.

Kami tentu berharap, mengingat pentingnya aplikasi ini, dan telah dilakukan beberapa kali peningkatan kemampuan fitur-fitur untuk kepentingan dukungan penanganan vaksin Covid-19, maka melalui forum yang terhormat ini, saya tentu berharap kerja bersama-sama dengan Komisi I untuk melakukan sosialisasi yang lebih massif kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi ini untuk membantu Indonesia di dalam memutus mata rantai Covid-19. Sekaligus ya membuka ruang bagi kita bersama untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional kita.

Penambahan fitur registrasi vaksin dan sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi berupa registrasi penerima vaksin dan akan memperoleh sertifikat vaksin secara digital di dalam aplikasi seperti yang tadi saya sebutkan.

Penyediaan chat box registrasi vaksin bagi tenaga kesehatan, Kominfo menyediakan akses pendaftaran vaksinasi berupa kanal chat box whatsapp, di tautan bit.ly/vaksinCovidRI/081110500567 bagi SDM tenaga kesehatan yang belum terinput datanya untuk mempermudah penerimaan vaksin Covid-19 melalui registrasi di mana saja. Jadi metode dalam rangka pendataan dilakukan dalam 2 jalur. Basis utamanya dilakukan secara digital, namun demikian secara *offline* apabila masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran atau belum merespons apa yang sudah terdata secara online, maka petugas-petugas lapangan di pemukiman masyarakat baik itu oleh Babinsa maupun Babinkamtibmas serta dibantu oleh pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan perorangan dalam rangka mensukseskan vaksinasi Covid-19.

Yang ketiga penyediaan sistem informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. SISD ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian, lembaga, operator telekomunikasi, untuk tahap pendaftaran, tahap distribusi, tahap pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi dan mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diantaranya, aplikasi Peduli Lindungi Kominfo dan Kementerian BUMN, untuk registrasi ulang *primary care* dari BPJS Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan vaksinasi dan aplikasi *smile* dari Kemenkes untuk monitoring distribusi vaksinasi, ditambah dengan aplikasi yang dimiliki oleh Bio Farma sendiri, untuk mendukung dan menunjang distribusi.

Kementerian Kominfo terus mengupayakan improvisasi sistem informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, untuk peningkatan efisiensi. Salah satu evaluasi pelaksanaan vaksinasi tahap satu kemarin adalah masih banyak nakes yang belum berhasil melakukan registrasi ulang. Terkait dengan hal ini, Kementerian Kominfo melakukan pembaharuan data pada SISD Vaksinasi Covid-19, sehingga saat ini telah berhasil diterbitkan 980 ribu tiket vaksinasi tenaga kesehatan.

Kementerian Kominfo juga terus melakukan peningkatan fleksibilitas SISD Vaksinasi Covid-19 melalui dua upaya. Yang pertama, mengirimkan tiket vaksinasi langsung ke dinas

kesehatan kabupaten/kota terkait. Dan yang kedua, mengembangkan aplikasi *primary care* agar jadwal vaksinasi bisa disesuaikan sesuai situasi dan kondisi, tidak hanya terpaku pada satu fasyankes dengan jadwal tertentu saja.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagai langkah pengembangan kapasitas diseminasi informasi terkait Covid-19, dan untuk melakukan optimalisasi penggunaan platform telemedis, Kementerian Kominfo melakukan upaya peningkatan konektivitas digital, yang meliputi, seperti tadi disampaikan, penyediaan akses internet di 3.126 fasyankes, dari total 13.011 fasyankes di Indonesia, yang belum memiliki fasilitas memadai. Dengan tersedianya 13.011 fasyankes dengan akses internet, diharapkan proses vaksinasi dapat berjalan lebih agresif dan lebih cepat. Yang kedua, percepatan penggelaran BTS 4G di desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G sampai dengan tahun 2022 nanti, ya kita berencana untuk menyelesaikan seluruh wilayah 3T sebanyak 9.113 desa dan kelurahan, yang sudah diselesaikan 1.209 dan akan diselesaikan pada Tahun 2021-2022 sebanyak 7.904 desa/kelurahan di wilayah 3T, terdiri dari 4.200 desa pada Tahun 2021 ini, dan sisanya 3.704 pada Tahun 2022, tahun depan.

Kementerian Kominfo juga melakukan pemantauan hoax terkait Covid-19 di ruang-ruang digital. Sampai dengan 30 Januari 2021, telah ditemukan 1.391 isu hoax terkait Covid-19, dan 92 isu hoax terkait vaksin. Isu hoax ini tersebar dalam 2.209 konten di facebook, instagram, twitter, dan youtube, dimana 1.926 konten diantaranya telah dilakukan *take down* atau pemblokiran. Dan sisanya masih dalam proses.

Kementerian Kominfo bersama-sama dengan KPCPEN melakukan upaya penanganan dari hulu-hilir yang dimulai dari pemberian literasi kepada masyarakat terkait Covid-19 dan vaksin, pemberian klarifikasi terhadap hoax, pembuatan kanal informasi resmi dan terpercaya serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait. Termasuk dalam hal ini Polri, dalam hal penegakan hukum, dan penanganan hoax. Kementerian Kominfo melakukan pembangunan infrastruktur TIK secara konkret, bukan hanya di *ground segment*, tetapi juga di *space segment*. Karena tidak saja pembangunan dan penggelaran TIK di darat atau di terestrial, tetapi juga pemanfaatan ruang udara kita melalui pemanfaatan satelit yang tersedia di ruang udara. Diantaranya, saat ini terdapat 50 gigabyte kapasitas satelit di Indonesia yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Lima satelit nasional, dan 4 satelit asing. Kementerian Kominfo sendiri membutuhkan sedikitnya 37 gigabyte saat ini untuk mengisi atau melayani kebutuhan TIK di bawah kewenangan Kominfo. Pembangunan infrastruktur TIK saat ini sudah menjadi infrastruktur dasar.

Bapak-Ibu, Anggota Komisi I yang terhormat,

Saat ini komunikasi dan informatika bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar. Setiap hari, setelah bangun dari tidur, yang kita manfaatkan, apa yang kita periksa pertama, adalah handphone kita. Yang berkaitan dengan informasi dan data yang ada di dalam handphone kita. Saat terakhir juga sebelum kita beristirahat malam, kita memeriksa juga handphone kita. Bahkan di tengah tidur, pada saat terjaga, yang pertama kita gapai adalah handphone kita juga. Dan karenanya, infrastruktur TIK sudah menjadi infrastruktur dasar bagi pelayanan publik. Sama seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Sehingga konsep pembangunan TIK kita adalah konsep pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, di segala umur, di segala level, atau tingkatan sosial masyarakat. Di segala ruang dan tempat atau wilayah.

Secara makro dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka memperkuat konektivitas digital, Kementerian Kominfo akan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur TIK

menjadi 10 tahun lebih cepat. Sebagai informasi, kebutuhan pembangunan atau penyediaan akses internet dan *coverage* sinyal setidaknya 4G di seluruh Indonesia, jika dilakukan biasa-biasa saja, maka baru dapat kita selesaikan Tahun 2032. Namun karena tuntutan atau dampak dari Covid-19, maka dilakukan akselerasi transformasi digital sekaligus untuk menyongsong dan mengambil manfaat dari revolusi industri 4.0, maka dilakukanlah akselerasi pembangunan infrastruktur TIK 10 tahun lebih awal. Diharapkan dapat diselesaikan tahun 2022 yang akan datang, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Jadi Covid-19 membantu kita untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan akselerasi pembangunan infrastruktur TIK 10 tahun lebih awal.

Selain itu Kementerian Kominfo juga melakukan penguatan infrastruktur data pemerintah dan tata kelola data itu sendiri, termasuk pertukaran data lintas negara, atau *cross border data flow*. Dalam berbagai forum kerja sama dan perundingan internasional, isu pertukaran data lintas batas negara selalu menjadi perhatian semua pihak. Di satu sisi, kami sangat memahami data memiliki nilai ekonomi. Di sisi yang lain, hak-hak privat harus dijaga dengan baik. *Googles*, studi google dan Temasek tahun 2020 memperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia di tahun 2025, sekitar 124 miliar dollar, atau setara 40% dari total potensi ekonomi digital Asean yang mencapai USD 309 miliar.

Namun di sisi yang lain, seperti yang disampaikan sebelumnya, kami juga sangat menjaga kedaulatan data dan perlindungan data pribadi. Di berbagai forum internasional, termasuk *Asean Digital Minister of Meeting*, seperti yang tadi saya sebutkan, yang baru lalu, dilakukan pada tanggal 21-22 Maret, eh 21-22 Januari 2021, secara jelas kami menyampaikan bahwa pertukaran data lintas negara harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip *lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity*.

Kepada Anggota Komisi I yang Saya hormati,

Masalah *data flow with trust*, saat ini menjadi isu besar dunia. *Data flow with trust* diterjemahkan sebagai dibutuhkannya suatu protokol alur data batas lintas negara. Posisi Indonesia pada saat G20 yang dilaksanakan di Saudi Arabia, untuk menekankan *flow data cross border*, dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip *lawfulness, fairness, transparent, dan reciprocity* tadi. Hal ini penting sekali. Namun di saat yang bersamaan, para pemimpin-pemimpin negara sahabat kita juga menanti agar prinsip-prinsip lalu lintas data ini didukung dengan payung hukum yang lebih kuat, dan payung hukum perlindungan data pribadi itu ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dunia internasional menunggu dan memperhatikan perkembangan pembahasan RUU PDP kita. Rakyat pun menanti agar perlindungan hak-hak privat mereka dapat kita bersama lakukan melalui undang-undang dimaksud.

Dengan demikian dan karenanya saya sangat menghormati proses yang betul-betul panjang dan dalam yang dilakukan antara Panja DPR RI Komisi I dan Panja Pemerintah. Dengan harapan semoga RUU PDP yang akan kita hasilkan ini betul-betul menjawab tidak saja kebutuhan perlindungan data pribadi rakyat di dalam negeri, namun juga untuk menjaga data dan nilai-nilai ekonomi yang dimiliki Indonesia di dalam perhelatan antar bangsa melalui *cross border data flow* yang terlindungi dengan baik.

Instrumen terpenting terkait isu ini adalah RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas bersama Komisi I DPR RI, seperti disebutkan tadi. Peraturan perundang-undangan ini bukan hanya akan memberikan kejelasan dan kepastian tentang perlindungan data pribadi, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pertukaran data pribadi. Secara khusus, lintas batas negara seperti disebutkan tadi. Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi I, agar kita bersama-sama dapat menjawab kebutuhan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini melalui pengesahan undang-undang tersebut secepatnya.

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Kominfo sedang dalam proses perubahan, dari kementerian yang sebelumnya berfokus pada berbagai bidang komunikasi dan informasi, menjadi kementerian yang juga fokus dan perhatikan di sektor digital. Sehingga kedua hal tersebut menjadi perhatian utama kita dalam menyusun infrastruktur dasar pada saat ini. Reposisi juga dilakukan pada kegiatan komunikasi publik, mengingat saat ini kenyataannya, komunikasi publik secara teknis didesentralisasikan ke sektor masing-masing, seperti tadi saya sebutkan, termasuk dalam penanganan Covid-19. Kementerian Kominfo tetap akan menjalankan komunikasi publik, dengan fokus, ya pada peran mengorkestrasi dan menyusun agenda-agenda setting.

Demikian penjelasan singkat dapat kami sampaikan, tentang agenda rapat kerja hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR RI. Semoga ini menjadi masukan awal di dalam diskusi-diskusi selanjutnya, untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan tata kelola serta tata laksana negara. Demikian kami sampaikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Walaikumsalam Warahmatullahita'ala Wabarakaatuh.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Nafas tersengal-sengal juga, gara-gara ini, Pak.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang Kami hormati,

Demikian tadi penjelasan dan sekaligus paparan dari Saudara Menkominfo, pada rapat kerja kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pendalaman dan tanya-jawab. Dan dipersilakan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI untuk memberikan tanggapan atau pun pertanyaan-pertanyaannya.

Telah masuk di meja Pimpinan, beberapa penanya yang datang dari yang hadir fisik maupun virtual, dan kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat abangda TB. Hasanuddin, dan selanjutnya atau cadangannya adalah Pak Sturman. Untuk itu kepada abangda, Bapak TB. Hasanuddin, kami persilakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin, Pimpinan, sebelah kanan, izin daftar, Bobby, dari Partai Golkar.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Baik, terima kasih, di catat.

Pak Hasanuddin, silakan.

F-PDIP (DR. H. HASANNUDIN, S.E., M.M., M. Si):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajaran yang Saya hormati dan Saya banggakan,

Pertama tentu saya harus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, selesai 7 tahun lebih cepat. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya, kemudian terutama dalam penyediaan infrastuktur. Jadi sekali lagi, kami menyampaikan rasa hormat, rasa bangga, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Itu yang pertama.

Yang kedua, jadi begini, kami dapat informasi, ada yang namanya Pamtas. Pamtas itu adalah pengamanan perbatasan. Itu terutama di daerah-daerah yang sekarang ini khusus perbatasan darat. Situasi medannya tidak begitu menguntungkan, sehingga patroli pun hanya dengan berjalan. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Kemudian Kalimantan dengan wilayah perbatasan Sabah, Malaysia. Kurang lebih ada dua atau, tiga atau empat batalyon pasukan TNI Angkatan Darat di sana. Nah ini tentu sistem komunikasinya itu tidak begitu baik, nah begitu, itu yang, termasuk didalamnya dan itu sudah mencari solusi, misalnya RRI dan lain sebagainya. Karena apa? Dibutuhkan sebuah informasi yang baik pada prajurit-prajurit itu supaya apa juga, bisa mampu melakukan komunikasi ya, atau dalam teori-teori tentaranya itu adalah kontak teritorial dengan masyarakat setempat, dalam rangka ya upaya-upaya bela negara, upaya-upaya kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah sistem komunikasi.

Nah apakah Pak Menteri sudah memasukkan program pembangunan BTS ini? Yang kalau tidak salah ini ada 1.682 di Tahun 2020. Nah kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajurit TNI, tapi untuk yang lebih besar lagi adalah kepentingan bangsa dan negara. Mungkin mohon mendapatkan prioritas. Itu yang kedua.

Yang ketiga dari kami, ada soal Pusat Data Nasional, yang 40 hektar sekian. Itu mohon progressnya sampai di mana? Tentu kami hanya bisa berdoa supaya pembangunan ini *as soon as possible*, lebih cepat lebih bagus, untuk bisa segera menyampaikan program-program ini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak TB. Hasanuddin.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sturman, dan cadangannya Ibu Christina. Waktu kami persilakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Bapak Pimpinan yang luar biasa. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran.

Bapak-Ibu sekalian yang Saya hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Om Swastiastu, Namu Budhaya, Salam kebajikan.

Merdeka!

Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Menteri, sudah memaparkan itu tadi dan dengan jelas dan tegas. Itu ciri-ciri mantan orang dari Senayan, Pak, memang begitu. Luar biasa Pak Menteri ini. Jadi saya dengar dulu beritanya. Saya kan baru masuk tahun ini, Pak Menteri. Jadi memang pantaslah Pak Menteri ini jadi menteri, pantas banget.

Saya tertarik menanggapi program-program prioritas Kementerian Kominfo Tahun 2021. Di sini ada 5 prioritas, ulangi, 6, 6 ya. Pertama, program penyediaan infrastruktur telekomunikasi, diantaranya di situ ada akses internet, BTS, dan *last smile*.

Kalau saya tidak lupa, tahun lalu, mungkin lewat Pak Menteri atau lewat Sekjen, Ibu Niken, menjanjikan adanya akses internet itu bahkan gratis, di tempat-tempat yang 3T. Bahkan mungkin 9T, Pak, terbelakang, tak terdengar suaranya, dan seterusnya, banyak kali itu. Kenapa? Karena banyak sekali daerah kita yang tidak bisa, jangankan internet, Pak, telepon saja enggak bisa.

Contohnya saya sudah berkali-kali, mungkin Pak Menteri sudah bosan dengar kalimat saya ini. Di Kepulauan Riau, yang konon kabarnya itu adalah 3T, itu sampai sekarang pun banyak daerah yang tidak bisa telepon. Apalagi internet. Kalau enggak salah dulu pernah Bu Niken janji, ya Bu Niken ya? Berapa titik kemarin? Kalau dulu, Bu Niken, 250 titik buat saya, mungkin. Tapi sampai sekarang mungkin, Ibu Sekjen yang sekarang ini, mungkin bisa 500 titik di daerah khusus Kepulauan Riau. Kalau gratis. Kalau bayar juga enggak apa-apa. Tapi sefaktanya, saya katakan keluar saya dari Bandara Matak itu, Matak, di Anambas itu, itu sudah enggak bisa lagi Pak, telepon, Pak. Jangankan internet, gitu lho.

Nah saya yakin dan saya lihat di sini memang untuk di Sumatera, internetnya itu terbatas banget, cuma 100 sekian. Nah mohon penjelasan Pak Menteri tentang hal tersebut. Mudah-mudahan, karena tadi juga waktu kami jalan ke mari, berbincang-bincang dengan teman-teman, mana itu janji Pak Menteri, mana janji Pak Menteri, gitu-gitu, Pak. Mungkin sekarang itu teman-teman itu lagi mendengarkan semua, ini. Di sana itu. Saya disuruh mewakili. Mudah-mudahan tahun ini terwujud.

Yang kedua Pak Menteri, tentang peningkatan siaran TVRI dan RRI. Kami mendukung dengan sangat luar biasa ini, karena memang RRI ini masih belum semua menguasai wilayah kita. Saya contoh saja di dapil saya Pak, Kepulauan Riau ini. Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau itu, kita lebih banyak mendengarkan radio dari Malaysia, maupun dari Singapura. Jadi jangan heran, itu mungkin di dapil-dapil lain juga seperti itu. Ini mungkin perlu perhatian yang luar biasa dari Bapak. Karena ada peningkatan salah satu di sini, saya lihat.

Yang berikutnya tentang kebijakan dan regulasi. Bapak tadi berkali-kali, tadi saya dengarkan, Bapak membicarakan tentang perlindungan data pribadi. Nah di situ, Pak siapa, Pak Sammy ya Pak, Pak Sammy sekarang agak cerah, kemarin-kemarin agak sedikit apa, wajahnya, kalau orang Batak bilang, *rodho mencucu, biyen, saiki enggak. Saiki* tambah ganteng, walaupun ditutup. Saya izin menyampaikan Pak, saya yakin dan percaya apa yang

dikatakan Pemerintah itu betul, dan sangat dibutuhkan masyarakat, tentang perlindungan data pribadi ini. Tapi tolonglah, kita ini harus bersinergi, Pak Menteri. Kurang sinergitasnya saya lihat. Pembangunan infrastruktur saja, perlu sinergi, antara alat, kemudian peralatan yang ada di bumi ini, kemudian ada yang satelit, dengan manusia dan lingkungannya. Kalau saya lihat, kurang, begitu lho. Mungkin ada kalimat-kalimat kemarin dan hasil kesimpulan mungkin sudah dilaporkan Pak Sammy kepada Bapak, bagaimana kita harus menyatukan lagi pendapat agar lebih sinergitas itu ada, Pak. Dan saya yakin Pak Menteri ini jauh lebih mengerti dari saya, tentang bagaimana sinergitas ini. Siap, bagaimana Pak? Oh siap, Pak.

Kemudian tanggal 25 yang lalu Pak Menteri, tanggal 25 Januari 2021, kami di Komisi I Rapat Dengar Pendapat dengan ORARI. Dan di situ, kesimpulannya, salah satunya adalah bahwa keinginan mereka, ORARI, mohon mereka diikutkan dalam membuat rancangan peraturan Kominfo pengganti Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio antar Penduduk. Menurut mereka, nah menurut mereka ini Pak, bukan menurut Bapak, pasti beda. Belum sepenuhnya sejalan dengan aspirasi mereka. Nah, dan mereka tidak diikutkan. Ini Pak. Dan kami juga, mungkin, saya enggak tahu, apakah surat ini sudah dimunculkan Pak? Waktu dulu Bapak juga yang memimpin ya Pak ya? Tanggal 25 kemarin. Apakah sudah resmi dikirimkan kepada Kominfo atau belum. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kondisi saat ini, yang namanya kebutuhan umum atau publik, perlu kita mendengarkan semua aspirasi dari lapisan masyarakat agar tidak ada yang tertinggal.

Kemudian berikutnya, yang terakhir Pak, dari kami, tentang RPP Pos ini yang sedang diselesaikan, mungkin perlu juga, kok teman-teman lain yang berkaitan dengan pos, bukan hanya orang pos saja yang dilibatkan tentang pembuatan RPP ini. Juga dilibatkan dari pengguna-pengguna lainnya, agar bisa lebih mengakomodir kepentingan masyarakat.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Sturman.

Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Christina, dan cadangannya Pak Imron Amin.

Terima kasih.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa dari saya, pernyataan atau penegasan dan juga pertanyaan, ini, Pak Menteri, terima kasih atas paparannya.

Yang pertama soal *roadmap digital*, ini kan 2021-2024, tadi Bapak sudah sampaikan ke kami, bahwa statusnya saat ini di Presiden dan menunggu review dari Beliau, ya. Nah kami sangat berharap Pak, ini bisa dibantu agar di *push* juga Pak Presiden, supaya semester I ini bisa selesai. Semester I 2021. Karena ini sangat penting, agar bisa diimplementasikan segera, mengingat tadi kerangka rencana-rencana aksi Bapak tadi, program-program itu sangat baik sekali kalau kita sudah memiliki peta digital ini.

Lalu yang kedua, terkait target penyediaan akses internet. Nah tadi Pak TB juga sudah angkat apresiasinya ya. Ada 7.904 desa atau kelurahan di daerah 3T, di mana di 2021 akan diadakan di 4.200 titik, dan 2.022 di 3.704. Saya ingin bertanya, apakah target ini realistis ya Pak Menteri? Mengingat tadi disampaikan juga untuk 2020 itu tercapai hanya 1.209. Nah jadi kalau memang bisa dicapai, wah sangat bagus sekali. Tapi pastinya perlu langkah-langkah, karena berkaca dari pengalaman 2020, kita hanya bisa 1.200.

Yang ketiga terkait dengan analog switch off. Jadi memang Undang-undang Cipta Kerja mengamankan, November 2022 ini sudah diimplementasikan. Nah kami mendapatkan masukan bahwa sebetulnya diperlukan tim, ini Pak, untuk sinkronisasi, terkait dengan kewenangan, peran-peran, dari stakeholder. Paling tidak kan ada Kominfo di situ, lalu ada Kemenkopolkukham, lalu ada KPI juga. Nah ini perlu menyiapkan rencana aksi juga. Jadi kami minta agar Kominfo bisa menjadi *lead* ya, karena 1 tahun 10 bulan ini waktu yang cepat. Lalu mengingat lagi ini mesti disosialisasikan. Ini kan menyentuh kehidupan rakyat banyak ini ya, karena mereka semua harus *convert*, belum lagi tadi kita bicara daerah Indonesia yang begitu luas, di 34 provinsi. Jadi kami harap Kominfo bisa berperan lebih aktif untuk hal ini.

Terkait dengan kasus hoax, tadi di catatan kami melihat, Bapak memang selalu aktif ya, Kominfo *take down* informasi hoax, kami apresiasi.

Lalu khusus untuk vaksinasi, vaksinasi ini kan menjadi program besar negara kita ya. Nah Kemenlu itu salah satu garda terdepan yang melakukan segala upaya untuk bisa apa, memastikan akses ketersediaan vaksin bagi bangsa kita. Kami tahu pasti itu ya, dari bulan Maret 2020 kami mengikuti. Nah jangan sampai kasus-kasus hoax yang istilahnya tadi Cuma 92 ya, tapi bisa menimbulkan ya itu tadi, mempengaruhi masyarakat, membuat masyarakat menjadi tidak yakin, lalu proses distribusi vaksin juga malah jadi terhambat, dan segala macam. Kami ingin Pak, agar ada satu kasus hoax yang bisa kita angkat, yang bisa kita proses, lalu ini bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk semua orang. Jangan menyebarkan hoax terkait vaksinasi. Tadi kan disitu tertulis, ada yang sudah diproses juga oleh Polri. Jadi saya ingin bertanya, model koordinasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo, kalau misalnya Kominfo yang memang apa namanya, menangkap begitu ya, "Oh ini adalah kasus hoax, kami akan tindak". Mungkin kita angkat satu lah sebagai contoh kasus, kita proses, biar ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sturman, jadi betul Pak, kalau Panja PDP itu kebetulan saya kan juga salah satu anggotanya. Dan saya juga di Badan Legislasi. Jadi saya juga, kemarin Cipker itu juga ikut terlibat. Kami lihat ya, memang tidak mudah Pak, menyamakan persepsi antara apa yang diinginkan DPR, mewakili kepentingan masyarakat dan tentunya konstituennya ya, dan juga kepentingan pemerintah. Nah kita harus menemukan titik di situ, Pak. Nah kalau kita *judge* dari kemarin, berlangsungnya pembahasan terakhir, ini sudah sedikit lagi *deadlock*. Itu yang terjadi. Jadi kalau Bapak bilang 145 dari 371 DIM tahun 2020, kelihatannya indah, tapi tidak begitu kenyataan yang ada. Jadi kemarin saya berbicara, izin, untuk Pimpinan Panja, Pak Kharis, Beliau pernah menyampaikan juga di rapat terakhir, agar Tim Komisi I dengan Tim Kominfo ini bisa bersinergi dulu di luar. Ini sesuatu hal yang normal dilakukan, kayak Baleg itu selalu kayak gitu, antara pimpinan, kapoksi dan pemerintah, kira-kira ada isu yang sulit, mereka duduk dulu. Samakan persepsi, habis itu dibawa lagi ke kita. Jadi enggak mentok di ruang Rapat Panja. Contoh, terkait hak dan kewajiban. Itu coba deh, benar-benar dipetakan dulu. Pemerintah maunya bagaimana, alasannya kenapa, DPR maunya seperti ini. Lalu soal otoritas independen. Itu bagi kami, penting, Pak. Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksinya menyampaikan, kami ingin ada otoritas independen. Pastinya fraksi-fraksi lain juga banyak. Waktu itu saya catat ada beberapa yang memang menginginkan ini juga. Sementara pemerintah kelihatannya *reluctant*. Nah ini coba diketemukan dulu, Pak. Kita cari titik tengahnya. Jadi Pak Sammy, *next time* kita berbicara di sini sudah enak *flow*-nya. Karena kita juga ingin cepat, kita juga menjanjikan ini kepada

masyarakat. Ini bisa apa, memberikan, menjawab, permasalahan, problematika yang begitu banyak ada, kami sangat mengharapkan ini bisa selesai.

Nah lalu yang terakhir tentang ORARI. Kami kemarin memang RDP, kami hadir di sini mendengarkan, rupanya di rancangan Permen yang sudah dibuat itu ada satu ketentuan yang menghilangkan kewajiban anggota radio amatir untuk bergabung dengan ORARI. Nah kami ingin mendengar dari versi Kominfo, apa *reasoning* dibalik keinginan ini? Kalau memang itu sesuatu yang memang harus, penting, atau seperti apa, ya monggo. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan lain di situ yang kiranya tidak tepat atau tidak pas, ya, mari, kita ingin mendengar juga, karena ini menjadi kepentingan kita semua juga.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Ibu Christina.

Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Bapak Imron Amin, dan cadangannya Bapak Anton Sukartono.

Waktu kami persilakan.

F-GERINDRA (R. IMRON AMIN, S.H., M.H.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

**Pimpinan yang Saya hormati beserta anggota Komisi I, dan
Yang Saya hormati Bapak Menteri,**

Untuk mempersingkat waktu Bapak Menteri, tadi yang *jenengan* sampaikan, ada bahasa, “tolong didorong anggaran Kemkominfo”. Tentunya Inshaa Allah kami, anggota Komisi I, selalu akan mendorong dan memberi *support* kepada Kemkominfo.

Namun di sini ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan, namun ada 3 poin. Tentunya poin pertama tentang perlindungan data pribadi. Tadi yang disampaikan Pak Menteri, luar biasa, apa, kesiapan dalam melindungi data pribadi, tadi selesai lebih cepat 7 tahun, dan ini terkait data pribadi, belum ada 2 minggu yang lalu ini Pak Menteri ya?

Saya kan tinggal di RJA, itu ada Pamdal datang ke rumah dan dia menyampaikan ke saya, kebetulan bukan saya yang menemui, tapi pembantu saya, dia bilang, “Ada enggak yang namanya Fitriah?”, di rumah saya enggak ada yang namanya Fitriah. Saya suruh tanya itu, kenapa kok tanya Fitriah? Ternyata pinjaman online. Nah itu kan, kita enggak ada nama itu, kok bisa muncul, di RJA, lagi. Itu kan jadi pertanyaan besar bagi saya.

Dan ada satu hal lagi, yang saya alami juga, ketika saya ditelepon dari pihak bank, dia mengajukan pinjaman, mengajukan, dan sebagainya. Saya bertanya pada yang bersangkutan, “Bagaimana Anda mendapatkan data saya?”, sedangkan data pribadi itu sudah apa, sudah diatur sesuai apa ya, undang-undang yang ada, makanya sekarang ada revisi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, saya bilang, “Saya punya hak atas data pribadi saya”. Tapi dia menjawab, “Saya juga punya hak, atas dasar peraturan”, dia bilang begitu. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, sejauh mana tentang keseriusan Kemkominfo ini dalam menanggapi permasalahan yang ada pada saat ini.

Dan yang kedua, ini tadi saya melihat di lembar 21 ya, di sini ada peta negara kita, di sini saya lihat banyak ya titik, area-area 2, 3, 1, 4, tapi yang jadi pertanyaan saya, di Madura, di dapil saya belum ada satu titik pun ini Pak Menteri, ya. Sedangkan dapil saya itu termasuk terdalam, terjauh, bahkan enggak ada sinyal, Pak Menteri. Jangankan 4G, sinyal saja enggak masuk, Pak Menteri. Enggak usah jauh-jauh ke apa, 1G, 2G, 3G, 4G atau 10G, sinyal saja susah, Pak Menteri. Dan saya sempat *cross check* di setiap 4 kabupaten dapil saya yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, namun Kominfonya kayaknya cuma ada di Bangkalan, tok. Dan tadi yang disampaikan *jenengan* memang indah sekali, tapi yang jadi catatan saya, bagaimana *jenengan* mengkomunikasikan terkait 3T, terjauh, terluar, terdalam, sedangkan Kominfo sendiri kayaknya belum menyeluruh ini ya. Ini jadi pertanyaan saya, bagaimana cara *jenengan* memper- apa ya, mempermudah, ya jadi sempat kepikiran ini bagaimana ya, sedangkan Kominfonya saja di Madura, di dapil saya saja kayaknya cuma ada di Bangkalan saja. Kita jadi bingung.

Dan yang terakhir Pak Menteri, tentunya kita mohon dengan sangat, karena tadi luar biasa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, cita-cita dan keinginannya Pak Menteri, ingin memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia di bidang TIK. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana dan sejauh mana keseriusan Pak Menteri dalam program pemasangan wifi di 3T ini, terutama di dapil saya ini, Kominfonya saja ada cuma di Bangkalan. Sampang dan Sumenep, saya tanya kan kemarin, belum ada.

Dan yang terakhir Pak Menteri, karena sekarang banyak WFH, sekolah di rumah, tentunya saya minta dengan sangat kepada Pak Menteri, terkait *jenengan* tadi sampaikan, bangun tidur mau lihat *hand phone*, mau tidur lihat *hand phone*, makan melihat *hand phone*, ya mohon maaf, cuma mungkin satu hal ya, enggak bisa lihat *hand phone*. Kadang mandi, lihat *hand phone* juga itu Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana *jenengan* apa, menangani, mengantisipasi, terkait, kan banyak tuh iklan di media atau tayangan yang memiliki unsur 18+ itu, baik di facebook. Saya kalau enggak bisa tidur, sampai Subuh saya buka itu Pak, Pak Menteri, saya buka video tuh, itu ada tuh, lumayan, 18+ itu. Itu bagaimana kalau anak saya melihat, umur 7 tahun, 6 tahun. Itu, bagaimana yang lainnya. Karena tadi yang dipaparkan Pak Menteri, luar biasa, saya sangat mengapresiasi.

Mungkin demikian, Pimpinan, terima kasih.

Akhirul kalam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Imron Amin.

Berikutnya kami persilakan kepada Pak Anton dan cadangannya, Bapak Dr. Sukamta. Waktu kami persilakan.

F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Izin Pak Menteri.

Pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan 5 program prioritas untuk percepatan transmisi digital menuju masyarakat digital Indonesia, antara lain penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informasi, serta komunikasi publik. Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 diantaranya sudah terjangkau pelayanan 4G. Tapi Pak Menteri, masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum tertangani 100% 4G di Indonesia, termasuk dapil kawan saya dari Madura ini. Sebanyak 913 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, atau 3T, serta ada 3.435 desa dan kelurahan yang bukan 3T. Itu bagaimana, Pak Menteri?

Pertanyaannya yang pertama, pemerintah sudah mengeluarkan biaya sangat besar guna percepatan transmisi digital menuju masyarakat digital Indonesia. Salah satunya dibangun tol langit atau Palapa Ring. Sudah sejauh mana manfaat pembangunan infrastruktur Palapa Ring sampai saat ini?

Posisi geografis Indonesia dilewati oleh jalur 3 lempeng tektonik, apakah pemetaan Palapa Ring dan titik pembangunan BTS sudah mengkaji dan mengantisipasi terhadap kemungkinan bencana rawan gempa? Pemerintah sudah mengklaim 70 ribu desa terjangkau layanan 4G. Sedangkan tidak semua masyarakat mampu menggunakan perangkat berteknologi 4G baik dukungan daya beli maupun kemampuan penggunaannya. Khusus di area pelosok dan daerah tertinggal.

Kita yang mengenai yang *awareness*, Pak, apa upaya Kominfo membangun *awareness* pemerintahan untuk pada daerah-daerah yang tidak *tercover* Pak, maupun lemes *signal coverage* seperti contohnya di dapil saya Pak, di Kabupaten Bogor itu memiliki 434 desa dan kelurahan yang masih banyak terdapat desa-desa tersebut memiliki ICT yang *blank spot*. Kira-kira apa terobosan Pak Menteri, sehingga yang *blank spot* ini bisa *tercover*.

Spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas atau *limited natural resources* yang dalam pengelolaannya memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. Ini bagaimana Pak, menyelenggarakan monitoring dan meningkatkan frekuensi perangkat teknis pada saat ini.

Dan yang terakhir Pak Menteri, Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menanggulangi penularan Covid-19. Aplikasi ini mengandalkan kepedulian, peduli kepada masyarakat untuk saling membagi data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Kominfo melakukan pengecekan keamanan aplikasi tersebut dan meningkatkan keamanannya dari kebocoran serta menelusuri dugaan peretasan basis data pasien Covid-19 dari aplikasi Peduli Lindungi yang beredar di dunia maya baru-baru ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Mas Anton.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sukamta, dan cadangannya, Bapak Charles Honoris. Ya Pak Charles saja kalau begitu.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang Saya hormati,

Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi Covid ini membuat ketergantungan terhadap internet semakin tinggi, ada *work from home*, belajar dari rumah, dan seterusnya.

Tadi saya juga sepakat dengan Pak TB, kami mengapresiasi percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi untuk fasilitas kesehatan. Maju 7 tahun ini sangat baik sekali karena memang dibutuhkan sekarang. Nah tentunya kami juga menyambut baik adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur BTS Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Selesai 10 tahun ya, rencananya. Nah tentunya ini tidak akan semudah membangun infrastruktur untuk fasilitas kesehatan, tetapi sekali lagi, sangat diperlukan. Nah bahkan kalau memang memungkinkan, lebih cepat lebih baik, Pak. Karena sekali lagi, ketergantungan masyarakat terhadap internet semakin tinggi, mengingat pandemi Covid-19 masih belum kelihatan kapan selesainya.

Pertanyaan saya berkaitan dengan anggarannya, Pak. Tadi disampaikan, ya Bapak sudah memaparkan anggaran secara umum, tetapi saya ingin tahu, ini anggarannya apakah full dari APBN, atau di *mix* dengan anggaran yang diambil dari dana USO. Dan dari perjalanan di tahun, awal tahun 2021 ini *progress*-nya sudah sampai mana, apakah target yang Bapak catat ini akan bisa direalisasikan?

Berikutnya terkait dengan Pusat Data Nasional. Ini juga satu hal yang sudah sangat dibutuhkan oleh Indonesia, karena tadi Bapak sendiri sudah sampaikan, banyak institusi memegang data penduduk Indonesia dan ya kurang lebih tercecerlah begitu. Kita membutuhkan satu pusat data yang bisa komprehensif dan menjadi pusat data nasional. Nah pada rapat September 2020 yang lalu, memang disampaikan bahwa pembangunan pusat data nasional ini dapat, dan dibiayai oleh dana pinjaman lunak dari Perancis, Pak. Saya tidak ingat pada saat itu, penjelasannya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan sekali lagi, urgensinya apa? Kenapa Perancis terlibat di sini? Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak TB juga, *progress*-nya sudah sampai mana? Dan apakah misalkan melibatkan pinjaman dari negara lain itu ada resiko yang harus kita mitigasi, yang harus kita hadapi? Dan juga, ya, *progress*-nya sampai mana.

Yang berikutnya terkait dengan keterlibatan Kementerian Kominfo dalam komunikasi publik terkait dengan vaksin, Pak. Saya ingin menanyakan apakah Kementerian Kominfo dalam menjalankan tugas komunikasi publiknya untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan vaksinasi, apakah Bapak melakukan survey secara berkala? Apakah Bapak hari ini sudah memiliki survey, berapa persen dari publik di Indonesia bersedia untuk divaksin? Berapa persen yang menolak?

Kalau misalkan belum ada, saran saya, Kementerian Kominfo harus membuat survey secara berkala. Kalau perlu setiap minggu, Pak. Sehingga *progress* dari komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah bisa kelihatan, apakah efektif atau tidak. Karena sekali lagi, kalau kita melihat dari berbagai kebijakan yang sudah diterapkan, PSBB, PPKM, dan sampai

hari ini angka penularan Covid masih belum terkendali, maka sesegera mungkin kita harus bisa memvaksinasi masyarakat Indonesia untuk bisa segera mencapai *herd immunity*, begitu.

Dan untuk bisa mencapai *herd immunity*, untuk mensukseskan vaksinasi, tentunya keinginan dari publik untuk divaksin itu menjadi sangat penting. Dan kita sangat mengandalkan Kementerian Kominfo, pemerintah mengandalkan Kementerian Kominfo sebagai institusi yang menyebarkan, mendistribusikan komunikasi publik terkait hal inilah.

Jadi saran saya harus ada survey secara berkala, walaupun misalkan ada, angkanya berapa, ya, kesediaan publik itu seperti apa hari ini untuk divaksin, dan ya tentunya harus bisa melibatkan berbagai institusi dan berbagai stakeholder. Ya termasuk teman-teman di DPR ini. Setiap Anggota DPR itu bisa menjadi anggota DPR, ya mungkin Bapak juga pernah menjadi anggota DPR, dipilih oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat ya, sehingga masing-masing dari kita pasti punya konstituen yang dimana kita masih terus berkomunikasi secara aktif. Jadi Bapak harus bisa melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk Anggota-anggota DPR untuk bisa menyampaikan kepada publik, pentingnya vaksinasi agar kita bisa segera keluar dari pandemi Covid-19, ya.

Mungkin sekian dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Mas Charles.

Waktu berikutnya kami persilakan kepada Pak Sukamta, yang sudah kembali, terima kasih.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Anggota yang Saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,**

Terima kasih atas paparannya yang cukup komprehensif, mencakup banyak hal, mulai dari kinerja 2020 sampai rencana ke depan, dan isu-isu aktual.

Perkenankan saya menyoroti beberapa hal yang barangkali perlu untuk mendapat perhatian dari Pak Menteri dan jajarannya. Saya mengapresiasi atas presentasi yang cukup komplit ini.

Namun demikian, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama soal infrastruktur digital, tadi sudah dijelaskan tentang apa yang sudah dikerjakan dan rencananya. Nah saya hanya menggarisbawahi bahwa diluar daerah 3T, di Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk DIY dan Jawa Timur, itu masih banyak juga daerah *blank spot*, Pak. Kemarin waktu Komisi I kunjungan ke Malang ini, di daerahnya anak buahnya Pak Menteri ini, Mas Dewa. Kita diajak ke tempat wisata yang di situ enggak ada sinyalnya, Pak. Jadi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Mungkin Dewa dengan sengaja bawa ke situ tuh, biar dilaporkan hari ini kayaknya itu.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Langsung *blank*. “Kenapa kamu ajak kami ke sini?”, saya tanya begitu. Katanya mau *matur* Pak Menteri, enggak berani. Jadi ngajak kita, Komisi I nih. Nah di DIY juga begitu, Pak. DIY ini wilayah yang saya kira masyarakat kami ini masyarakat yang kreatif, dan terampil, Pak. Banyak perusahaan internasional itu membuat produk itu di Yogya. Ada produk fashion dari New York, dari Korea, buat produknya itu di Yogya. Ketika saya tanya, “Kenapa kok demikian?” Karena memang tangannya orang Yogya itu memang *crafty*, katanya, apa, terampil. Itu beda dengan di daerah lain.

Nah di masa pandemi ini Pak, ini orang-orang terampil itu kesulitan, sekarang. Nah salah satunya adalah karena pemasarannya. Nah saya berharap, ini bisa ditunjang dengan *co.digital*, seperti yang tadi Pak Menteri presentasikan, kita ingin memanfaatkan secara ekonomi macam-macam, tetapi wilayah-wilayah yang pusat-pusat *handy craft*, batik, yang sangat luar biasa, saya tahu ada 1 kecamatan itu produk batiknya bagus banget, tapi sinyalnya enggak ada, Pak. Jadi kalau kita ke sana ini, mau segala jenis operator, enggak ada sinyalnya di situ. Nah rupanya yang demikian ini masih agak banyak. Nah mohon, ini sudah sejak periode lalu ini kita angkat. Satu-satu ada yang terselesaikan, tapi masih banyak yang belum, Pak. Jadi saya *up date* itu 2 pekan yang lalu saya ke wilayah Bantul, di situ enggak ada sinyal. Saya ketemu perangkat desa, terus, “Kamu kalau koordinasi dengan Pak Lurah bagaimana, enak dong, enggak pernah dipanggil rapat malam-malam”. Dibawakan HP, Pak. Jadi untung enggak pakai kantong. Ya zamannya zaman digital tapi infrastrukturnya belum terjangkau sampai ke daerah.

Nah mohon, di periode lalu ini hambatan peraturan, Pak. Karena prioritas hanya 3T, tertinggal, terluar, terdepan. Nah sementara DIY ini dianggap tidak 3T lagi. Tapi itu salah, karena DIY ini berbatasan dengan Australia, Pak. Jadi masuk terdepan juga itu. Nah mohon ini Pak Menteri bisa beri jalan keluar, supaya daerah yang kami wakili ini bisa bebas dari *blank spot*. Bagaimana caranya. Karena saya yakin, masih banyak yang bisa dijangkau. Kalau di wilayah-wilayah yang sangat *remote*, seperti dari daerah-daerah yang dekat Pasifik saja bisa dijangkau, saya harapkan untuk wilayah Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ini tolong bisa diselesaikan. Syukur kalau 2022 ini sudah merdeka *blank spot*, untuk wilayah Jawa. Ya kalau Jawa susah ya, saya mohon DIY deh, karena ini juga daerah wisata. Masih ada kecamatan yang, salah satu kecamatan terbesar di Gunung Kidul itu enggak ada, di ibukota kecamatannya enggak ada sinyal, Pak. Jadi betul-betul *blank spot* di situ. Nah mohon ini sekali lagi bisa diprioritaskan.

Yang kedua, soal pemanfaatan infrastruktur, ini juga tadi sudah dipaparkan, ada rencana-rencana, tetapi kelihatannya prosentasenya masih sedikit. Baru di bagian barat yang sudah agak lumayan prosentasenya. Namun ini juga bisa dibuat perencanaan yang baik, jangan sampai terlalu *idle*, terlalu lama, karena sebagaimana jalan tol itu kalau bangun tol, bangun pelabuhan, bangun infrastruktur digital, non digital ini, kalau tidak dimanfaatkan ya mangkre, lama-lama termakan usia dan kita akan rugi, argo jalan terus.

Kemudian soal hoax tadi, kami apresiasi Kominfo ini cukup, ya memang andalannya Kominfo ya, untuk memerangi hoax. Hanya kami berharap ini diskusi sejak periode yang lalu juga, soal hoax ini. Di dalam Undang-undang ITE Pasal 42, itu kita mendorong, bukan hanya kita ini bersifat pasif, mencegah kalau ada hoax di *take down*. Tapi kita lebih pro aktif, bagaimana agar internet kita itu punya tata kelola yang konstruktif dan positif, Pak.

Nah dalam Pasal 42.e itu diamanahkan sebetulnya dulu waktu kita diskusi membahas Undang-undang ITE itu, pemerintah buat PP, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Internet, Pak. Karena internet provider maupun para penyelenggara media sosial itu, mereka bisa kok diberikan aturan. Daripada Kominfo mencermati hoax satu per satu, lebih baik *whatsapp*, *facebook*, apalah namanya itu, bebani mereka supaya men-*take down* hoax,

membuat fitur yang kalau ada hoax, itu langsung ketahuan. Di blur, enggak bisa dibuka atau apa. Sekarang saja misalnya di instagram, ketika ada konten yang sensitif, kan langsung tidak kelihatan *there is a sensitive content* dan seterusnya kan. Nah saya kira kalau kita membuat peraturan, mengharuskan mereka itu untuk secara otomatis men-*take down* hoax, berdasarkan EA yang mereka bisa kembangkan, itu akan jauh mempermudah Pak, karena pasti kita akan ketinggalan kereta.

Kalau kita akan mengejar penjahat, penjahat jauh lebih cerdas, lebih apa namanya, lebih pintar. Nah saya kira kalau kita bisa lebih konstruktif begitu, mudah-mudahan iklim digital kita juga lebih konstruktif, Pak. Sehingga para pejabat tidak harus koor, bilang hoax. Hoax itu menurut saya itu sampah digital yang akan hilang sendirinya. Yang mudah menyebarkan hoax dan terkena hoax itu adalah generasi kolonial, Pak. Kalau generasi milenial mah enggak peduli dengan info-info sampah begitu. Karena mereka hidupnya sudah di dunia digital. Nah jangan sampai energi terbesar kita justru kita taruh di situ. Saya berkali-kali mengatakan, kriminal digital ini luar biasa besarnya. Hoax itu hanya 1%. Walaupun itu besar sekali, jangan sampai ini menjadi jargon politik, semua hoax, semua hoax, semua hoax. Yang mengkritik pemerintah itu hoax, gitu. Kan jadi bahaya dalam kehidupan demokrasi kita, Pak.

Nah sementara urusan penipuan online, penyalahgunaan data online, pencurian data online, itu omzetnya sekarang sudah naik terus-menerus. Nah saya berharap urusan-urusan yang kita ini, kalau kita bisa segera tata itu urusan tata kelola konten, Kominfo dan pemerintah bisa *move on* ke *next step*, yaitu memerangi kriminal, bersama dengan Polri, atau dengan penegak hukum yang lain.

Beberapa kali laporan soal penipuan online itu enggak ter-*follow up* dengan baik, Pak. Saya pernah kena, bukan saya sendiri, tapi ada teman dekat, sudah ketahuan, penipuan dengan jumlah yang cukup lumayan banyak, kita lacak itu yang menipu itu nomornya dengan rekeningnya, sudah ketahuan itu KTP-nya di sana, nomor rekeningnya sekian, banknya diminta untuk dibekukan, itu rekening penipu, kita laporkan kepada petugas hukum. *No respon* Pak, sampai sekarang Pak. Dicatat iya, yang catat, ngetik, nunak-nunuk pakai 11 jari. Saya, bagaimana mengejar maling di kita dengan cara analog? Enggak akan kena. Dan ujung-ujungnya, laporan enggak di *follow-up*-i karena dianggap nilainya terlalu kecil, cuma Rp25 juta. Tapi saya bilang ini Rp25 juta, kalau bisa menipu 1000 orang, ini Rp25 miliar, lho. Dan rekening setelah kita lacak, ke rekening itu, langsung dipindah, pindah, pindah, dengan sangat cepat sekali. Jadi kejahatan digital yang ingin saya katakan adalah, ini kuantitas dan kualitasnya itu makin beragam dan makin menguatirkan. Nah jangan kita berhenti pada urusan hoax meng-hoax, ya. Tapi ayok kita *move on*. Bangsa ini perlu dilindungi, rakyat kita ini perlu dilindungi. Nah termasuk misalnya soal perjudian online lah, pornografi lah, mohon ini juga sudah melanggar ITE, itu jelas.

Nah tolong ini diselesaikan juga, Pak. Berapa situs prostitusi online, perjudian online, pornografi online, itu yang diselesaikan oleh Kominfo. Saya dulu saya minta berapa sih usia lamanya web atau usia digital dari situs itu? Itu kan belum ada jawaban, Pak. Karena lamanya situs itu berada di jagad digital, berapa usianya dia, itu menentukan omzetnya. Kalau Kominfo memberi ruang dia hidup seminggu, itu mungkin sudah miliar, ratusan miliar, mungkin juga triliun, Pak. Omzet perjudian online, omzet pornografi online, dan kejahatan-kejahatan online yang lain. Nah mohon ini jadi perhatian, Pak Menteri, supaya ini serius.

Nah saya hanya bisa mengejar Pak Menteri. Pak Menteri, mungkin bisa mengejar anak buahnya. Nah silakan anak buahnya yang bertanggung jawab. Kasih target Pak. Model Pak Jokowi itu kan gitu kan? Saya kasih target, kalau enggak kena target, mundur. Bagaimana caranya, gitu kan? Pak Jokowi-nya enggak perlu ahli soal teknisnya. Tapi targetnya diberikan.

Nah mohon Pak Menteri juga ini kami akan terus menyuarakan ini, bagaimana keseriusan Kominfo untuk menegakkan Undang-undang ITE yang ada, Pasal 27, 28, 29, 30, terkait dengan segala hal yang dilarang di dunia nyata, yang eksis di dunia digital ini, supaya

betul-betul jagad digital kita ini menjadi jagad yang positif, yang berbudaya, sehingga ketika kita masuk ke industri 4.0 dengan *road map* yang Pak Menteri sudah jabarkan itu, yang negatif-negatif itu, sampah-sampahnya itu mulai bersih, gitu lho. Jangan sampai kita mau masuk ke jagad digital yang hebat, tapi sampah digitalnya ada di mana-mana. Ini akan menggerogoti bangsa kita.

Nah ini mohon jadi perhatian yang berikutnya soal apa namanya, kriminal, di dunia digital ini. Karena sekali lagi, ini kan garda terdepannya kan Kominfo, Pak. Nah juga bukan hanya soal sampah digitalnya, dari sisi konten, Pak. Sampah digital dari sisi teknologi ini juga mohon perhatiannya, Pak. Dulu kira-kira sekian tahun yang lalu, banyak alat sadap yang dibeli, misalnya. Itu kan sampah juga. Karena setelah sekian tahun, ketinggalan. Itu sekarang ada di mana, dan siapa yang mengendalikan, Pak. Masih dibawah Kominfo, atau sudah di mana sekarang, dan siapa yang mengendalikan, Pak? Apakah masih dioperasikan atau enggak dioperasikan lagi? Nah mohon kita diberikan pencerahan, ini peraturan dan pengaturannya bagaimana? Karena di dalam Undang-undang ITE itu kita mengatur soal penyadapan, satu pasal, tapi diamanahkan untuk membuat undang-undang soal penyadapan. Nah sampai hari ini belum terjadi. Nah mohon sampah yang teknologi digital, bukan kontennya, ini kita juga diberikan laporan.

Kemudian yang berikutnya, soal *road map* digital, yang tadi sudah dipaparkan, 2020-2024, itu kita apresiasi. Pak Menteri sudah mendorong adanya *road map* digital. Kita berharap mudah-mudahan segera selesai. Namun saya belum mendapatkan gambaran Pak, dari yang tadi dipaparkan itu, karena baru judul-judulnya. Belum mendapatkan gambaran soal kedaulatan digital kita, Pak, digital *sovereignty* kita. Kan sekarang ini kita bukan hanya bicara soal darat, laut, dan udara, tetapi juga siber digital. Nah bagaimana soal kemandirian digital? *Road map*-nya seperti apa, Pak? Karena kami berharap Pak Menteri di dalam *road map* itu masuk tentang rencana-rencana yang mengutamakan produk-produk anak negeri. Supaya bangsa kita ini betul-betul mulai mandiri. Misalnya sekarang ada ketika orang bicara Covid. Sekarang ada genose, itu alat pendeteksi Covid. Dari teknologi digital yang dikembangkan, dia mengendus apa namanya, gas buang dari pasien Covid yang ternyata dia mengeluarkan zat kimia tertentu. Ya dia memang bukan pengganti PCR, dia bukan pendiagnosa Covid, tetapi dia pendeteksi keberadaan Covid di dalam tubuh manusianya. Nah ini kan punya anak negeri. Dan ada keberpihakan beberapa pihak di situ. Saya bersyukur dan sangat gembira dengan itu.

Nah saya berharap, sekarang dengan adanya misalnya whatsapp, membuat apa namanya, satu peraturan yang baru, yang meresahkan penggunanya, bagi orang yang ahli, mungkin itu tidak terlalu resah ya. Tapi bagi masyarakat umum itu cukup resah. Tapi yang saya ingin tangkap sebetulnya bukan soal resah dan tidaknya soal whatsapp itu. Ini momentum, Pak. Momentum ketika masyarakat itu sudah mulai resah dengan hal yang mapan, akan teknologi yang digunakan, teknologi import itu, kenapa tidak kita dorong produk dalam negeri Pak?

Banyak pengembang, anak-anak negeri kita ini yang punya kemampuan intelektual cukup, nah namun mereka tidak punya kemampuan mungkin kemampuan finansial, mungkin juga kemampuan *influencer*, yang punya *power* untuk mempengaruhi itu adalah negara, pemerintah.

Saya salut dengan Pemerintah Turki, terserah, terlepas dari produknya, BIP itu apakah lebih kredibel dibanding whatsapp atau tidak, tapi Pemerintah Turki berani dengan tegas mengatakan, "Ayo migrasi dari whatsapp ke BIP". Dalam waktu dekat, jutaan pengguna whatsapp migrasi. Itu saya salut pada pemerintahnya.

Nah saya membayangkan kalau Pak Menkominfo bisa melakukan begitu, Pak Menteri bisa jadi pahlawan nasional, ini Pak. Lho, kita bicara NKRI Harga Mati toh? Kan begini implementasinya. Kita bicara semangat NKRI, harga mati. Tapi pasar digital kita diambil orang luar, kita kasih dengan silakan diambil. Ini kedaulatan digital tidak kalah dengan kedaulatan

teritori darat, laut, dan udara kita, Pak. Nah ini saya berharap betul, ini momentum yang sangat bagus, yang perlu kita manfaatkan.

Yang juga tidak kalah pentingnya itu soal 5G, Pak. 5G ini kan sekarang sudah ada pertarungan geopolitik, 5G itu, menjadi pertarungan baru, bukan hanya soal senjata, militer, dan yang ekonomi. Tetapi 5G sudah menjadi perang baru.

Nah saya, ini sejak periode lalu kita tarik ulur. Saya tahu, tekanan dunia internasional sangat besar. Tanpa bermaksud saya membandingkan, periode lalu, kita disini diskusi untuk soal bagaimana Pemerintah itu berusaha menghindari untuk terlibat di dalam perang 5G ini. Nah saya mendengar tiba-tiba, kemarin, Pemerintah RI, hari ini mendorong kita masuk 5G. Kemudian setelah dilelang, dibatalkan. Setahu saya Pak, pelaku pasar dalam negeri untuk 5G ini belum cukup siap untuk masuk ke situ. Pasarnya memang besar. Tapi dari data-data yang saya kumpulkan, 80% pasar kita itu akan diambil oleh luar negeri, Pak. Pasar 5G. Jadi kita hanya akan menjadi konsumen lagi.

Sementara, yang jelas, pasar 5G ini akan mematikan *fix line* yang terkait dengan *vibes digital market*, Pak. Telkom akan mati, Pak. Indihome akan mati, Pak. Nah apakah itu renstra kita? Mematikan produk nasional kita? Sambil memberi ruang yang besar kepada pelaku-pelaku internasional. Mengacak-acak pasar digital nasional kita. Sementara kita tidak siap. Nah apakah kita punya *planning* untuk kemandirian 5G kita Pak?

Saya khawatir betul ini nanti saya enggak tahu apakah memang *plan*-nya dari Kemenkominfo begitu? Ingin mematikan pasar digital kita. Telkomsel, Telkom, itu kan milik nasional kita, Pak. Tapi *fix line* selain untuk wifi, macam-macam, nanti akan habis dengan 5G. Nah sementara sekali lagi, belum banyak orang pelaku-pelaku 4G saja sampai sekarang masih belum BEP. Ketika didorong untuk bersaing dengan internasional, untuk masuk ke 5G, pasti mereka akan kelabakan, Pak, bagaimana *memonetize*-nya, Pak. Nah mohon ini ada paparan yang cukup rinci tentang bagaimana *grand design* 5G kita Pak?

Saya berharap supaya kita ini tidak mudah memberi ruang. Mungkin ada orang yang dengan gegabah membuat MoU, mendatangkan kerja sama, tapi kita harus berani untuk mengatakan "tidak", kalau itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, Pak. Karena begitu kita masuk ke situ, habislah kita ini. Karena memang belum siap kita. Sekarang saja yang 4G termehek-mehek kok. Pemanfaatan infrastruktur kita saja masih dibawah 50% secara rata-rata nasional. Nah tiba-tiba kita memasukkan sebuah raksasa baru, yang akan mencaplok seluruh pasar digital kita, Pak. Nah ini persoalan yang menurut saya serius tapi kita tidak pernah diskusikan di sini, di ruang publik ini. Tahu-tahu pemerintah membuat lelang 5G, tahu-tahu dibatalkan sendiri. Ini ada apa sebetulnya? Nah mohon ini bisa ditanggapi, dari Pak Menteri.

Dan terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Sukamta. Sangat luar biasa.

Selanjutnya saya akan kembali ke sebelah kiri saya, Pak Mukhlis Basri, dipersilakan. Dan Mas Dede, cadangannya. Silakan.

F-PDIP (DRS. MUKHLIS BASRI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang.

Yang Saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi I,
Yang Saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Saya singkat saja Pak Menteri, saya ini hampir tiap minggu pulang ke dapil saya, Pak, saya berterima kasih bahwa pembangunan infrastruktur jaringan ini luar biasa. Hanya yang menjadi persoalan, setiap saya pulang ke dapil saya, Pak Menteri, adalah hampir sama dengan teman-teman saya tadi, beberapa daerah itu tetap masih *blank spot* ya. Karena kadang-kadang sinyal itu hanya 1, 2, lemah sekali. Nah inilah saya harapkan kepada Pak Menteri beserta jajaran, jangan hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur yang baru saja Pak, tetapi ya artinya dalam hal yang sudah ada ini, tetap harus dipelihara dan ditingkatkan.

Kenapa Pak, saya minta ini? Sekarang ini selain dari pada belajar jarak jauh, Pak, sekarang siswa-siswa perguruan tinggi ini banyak yang KKN-nya diarahkan kembali ke kampung masing-masing, Pak. Nah dengan adanya program-program seperti itu, ini hambatannya luar biasa, Pak. Seperti di dapil saya, saya itu di rumah aspirasi saya, saya buka internet, Pak. Gratis, Indihome seperti saya, ya. Tapi kadang-kadang yang kita siapkan sinyalnya hilang, gangguan. Tidak maksimal.

Selanjutnya saya memberikan apresiasi, sama dengan sahabat-sahabat saya yang sudah dulu ya. Yang pertama ya apresiasi atas realisasi anggaran Bapak, 2020 98%, ini luar biasa. Yang kedua, yang tadi, program Bapak bisa lebih cepat 7 tahun ini, ini kan sangat luar biasa.

Selanjutnya Pak Menteri, baru-baru ini kita katakanlah mungkin karena pandemi ini kita butuh anggaran yang sangat besar, nah baru-baru ini kita dikejutkan juga, saya mohon tanggapan dari Pak Menteri ini, bagaimana tanggapan tentang pemungutan pajak penghasilan atau PPh, dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penjualan pulsa kartu perdana, token listrik, dan voucher. Aturan tersebut kan kita sama-sama tahu, yaitu PMK Nomor 6 Tahun 2001.

Yang mana didalamnya disebutkan bahwa kegiatan pemungutan PPN dan PPh pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, perlu mendapatkan kepastian hukum. Padahal nilai pajak berupa PPN dan PPh, atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher, sudah berlaku selama ini. Sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru. Harga pulsa sudah termasuk pajak, sebab kalau jadi tambahan, maka harga pulsa juga akan lebih mahal. Tambahan pajak akan membuat harga jual pulsa dan kartu perdana menjadi lebih mahal. Padahal kebutuhan orang akan pulsa meningkat selama pandemik sekarang ini. Nah inilah yang saya mohon tanggapan. Karena sekali lagi, dengan adanya keluarnya Peraturan Menteri, PMK Nomor 3 Tahun 2001 ini atau Nomor 6, ini sekali lagi, yang akan menjadi korbannya katakanlah masyarakat penanggungnya.

Pak Menteri yang Saya hormati,

Tadi teman-teman juga artinya minta supaya seperti apa yang dikatakan Ibu Christina tadi dan teman-teman yang lain, termasuk Pak Jenderal tadi, antara Komisi I dengan Kominfo, ya saya kira sama dengan permintaan saya Pak, agar sinyalnya lebih ditingkatkan. Jangan *hower-hower* sinyalnya. Karena kami ini Pak Menteri, yang ditanya, kalau komisi-komisi lain itu, Pak Menteri kan bekas di Senayan sini, banyak mereka membawa-bawa program yang harus diberikan kepada masyarakat, ada CSR, ada segala macam. Kalau kami ini Pak, enggak ada, di Komisi I ini. Jadi sekali lagi, sinyal kita perlu kita tingkatkan ini.

Terima kasih Pak Menteri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Merdeka!

Waaalaikumsalam Warahmatullahita'ala Wabarakaatuh.

Mas Dede, kami persilakan.

F-PDIP (DEDE INDRA PERMANA, S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh jajaran mitra Komisi I, khususnya Kemenkominfo, Pak Menteri,

Yang pertama, saya ucapkan selamat dan apresiasi bahwa dari anggaran 2020 Rp5 T menjadi 16 koma sekian T. Tentunya ini kenaikan yang luar biasa, dibanding mitra Komisi I yang lain.

Untuk itu saya ingin menanyakan, bagaimana Bapak mewujudkan program Indonesia Merdeka Sinyal? Di Tahun 2020, targetnya 4.000 BTS. Dan di Tahun 2021 menjadi 4.200. Dari target yang sudah ada ini, berapakah yang sudah terealisasi? Itu yang pertama.

Karena kalau melihat dari Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, dari UN APU, Indonesia peringkat ke-7, dibawah Vietnam, Pak. Vietnam ini menurut data, 94 juta penduduknya, Indonesia 270 juta. Hal itu yang mungkin perlu pengkajian lebih dalam, Pak Menteri. Selain itu pada Tahun 2021, Kemenkominfo tentunya melanjutkan beberapa rancangan undang-undang, yang mana ada panja, Panja Internet, dan Panja PDP. Mana skala prioritas yang tentunya diusulkan oleh Pak Menteri, karena yang seperti disampaikan Pak Kamta tadi, ada target, bagaimana target-target tersebut bisa diselesaikan dan mana yang menjadi skala prioritas.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Mas Dede.

Selanjutnya saya akan kembalikan ke sisi kanan, yaitu ke Pak Dave, Pak Bobby, dan Pak Yan Mandenas. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dave, silakan.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pertama saya ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan dari Pak Menkominfo, yang hadir di sini beserta seluruh jajaran dan Bu Sekjen, Bu Sekjennya ada 2, satu depan, satu belakang. Terus juga dengan para Dirjen dan Pak Dirut.

Materi yang sudah diberikan dan juga presentasi yang dipaparkan sudah sangat baik, sangat bagus, cuma ada beberapa hal yang ingin kita perdalami. Selain yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan, teman-teman sekalian, ini yang ingin saya pertegas lagi, dengan anggaran dana yang sangat besar ini, dan juga ditambah situasi Covid, yang cukup menghambat pergerakan dan juga kinerja banyak dari kita, jadi sementara ada *analog switch off* yang waktunya semakin hari semakin mendekat. Terus juga, ya kalau 5G kan kemarin dibatalkan ya, cuma ya mungkin bisa diperdalam juga ini, kalau dengan dibatalkan ini, strateginya ke depan untuk memperkuat jaringan ini seperti apa. Apakah kita langsung loncat menunggu 6G atau tetap melanjutkan 5G, dengan apa namanya, ini teknologi baru, ataupun dengan provider baru, yang coba mungkin bisa diperdalam lagi.

Lalu juga dengan *analog switch off* ini juga, apakah TVRI ini ada peningkatan teknologinya ya? Apakah menggunakan APBN, atau apakah akan menggunakan teknologi asing dengan KE dari luar, *soft loan*, mengingat untuk *up grading* dan juga untuk digitalisasi TVRI seluruh Indonesia, itu butuh biaya yang sangat besar. Sementara APBN Pemerintah saat ini masih terfokuskan banyak untuk vaksinasi dan juga untuk penanganan Covid, ya.

Nah lalu juga, ini angka Covid setiap harinya ini meningkat, kemarin saja itu 14 ribu sekian lah ya, itu terus tiap hari ada rekor baru, rekor baru. Nah ini apakah masyarakatnya ini yang belum terinformasi dengan baik, ya apakah ada kendala dengan diseminasi informasi kepada masyarakat, atau hanya tingkat kedisiplinan? Ya ini mungkin dari Kominfo juga bisa lebih memanfaatkan sudah seberapa jauh dan seberapa dalam yang sudah di informasinya, soalnya jujur saja saya setiap ke daerah, kadang-kadang pejabat daerah itu pun juga sepertinya cuek ya. Ya jadi kita ini di pusat ini setiap kali rapat secara terbuka atau tertutup selalu menggunakan masker, setiap ada pertemuan selalu menggunakan masker. Jaga jarak, begitu ya. Cuma setiap kali saya itu turun ke bawah itu, terutama di level kecamatan dan kelurahan itu, tidak ada yang, suka malas jaga jarak atau tetap masih ngobrol sebelah-sebelahan, lalu pakai masker itu hanya pas jalan, begitu duduk, merokok, ngopi, buka langsung, masker. Tidak ada yang menjaga jarak. Nah begitu. Padahal jumlah angka penderitanya setiap hari itu selalu meningkat. Dan juga yang meninggalnya pun semakin banyak.

Ini saya juga baru dapat informasi, ada salah satu kerabat dekat saya meninggal barusan, karena komorbidnya jantung. Nah inilah yang mesti menjadi PR kita juga, ya untuk terus mengingatkan dan bagaimana strategi dari Kominfo ini untuk supaya lebih massif dan juga supaya lebih menyadarkan masyarakat tentang protokol-protokol kesehatan ya, dan juga ini saya masih mendapat banyak keluhan dari rekan-rekan, saudara-saudara saya juga yang dari wilayah-wilayah jauh ini, masalah *school from home*, ya. *School from home* ini memang kalau yang lebih dewasa ya, ya mungkin di atas kelas 5 SD sampai dengan SMA, itu sudah ada tingkat kedewasaan dan kesadaran sehingga lebih memudahkan. Tapi kan yang masih anak-anak kecil, seperti anak saya, masih kelas 1 SD ini, ini *school from home* ini tidak efektif. Nah tapi kan tidak mungkin kita paksakan sekolah ini terbuka.

Dengan kemarin itu saja, di mana, di Eropa, itu ada satu sekolah, di Eropa atau di Korea ya, itu ada satu sekolah, lupa itu, di sekolah, begitu buka, dalam waktu satu minggu, langsung setengah dari sekolahnya terpapar dengan Covid. Tapi masih banyak keluarga kita ya, yang di daerah 3T ataupun, enggak usah daerah 3T, masih di wilayah Jawa Barat saja mereka masih sulit mendapatkan sinyal. Ya karena tidak mampu pulsanyalah, peralatannya minim, nah itu kendala-kendala seperti itu lah yang perlu dicarikan jalan keluarnya lagi, sehingga kita kan masih belum tahu ini, ini saya dengar ada perkiraan, ini situasi ini mungkin masih sampai dengan akhir 21 sampai, mungkin diperkirakan sampai dengan pertengahan 22.

Jadi waktunya masih panjang, nah ini harus ada strategi yang bisa kita gunakan dan juga mungkin bisa diadaptasi ke *post Covid* nanti, ya.

Mungkin, apakah bisa juga ada *distance learning*, *school learning* ya, yang mungkin anak-anak yang sulit mendapatkan akses ke sekolah ya, karena jarak, segala macam, ya mereka bisa sekolah dari rumah tanpa harus, apa namanya, berjalan berkilo-kilo meter untuk mencapai sekolah.

Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Dave.

Dan selanjutnya Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pak Bambang.

Rekan-rekan Komisi I,

Bapak Menteri beserta jajaran yang telah hadir pada siang hari ini,

Pertama, saya hanya ingin mengusulkan kepada Pak Menteri, terkait dengan pembahasan RUU PDP, mungkin ditingkat komisi, bukan hanya di Panja, tadi saya hanya menambahkan yang disampaikan Pak TB Hasanuddin, karena pada saat yang sama, paralel, kan sedang dibuat Pusat Data Nasional.

Mengutip dari pernyataan di media, dari Pak Direktur Layanan Aptika, Bapak Bambang Dwi Anggono, bahwa saat ini ada 2.700 data center yang masuk di dalam SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sesuai dengan visi Bapak Presiden Jokowi bahwa *data is the new oil*, itu juga disampaikan Pak Bambang, bahwa dari 2.700 data center, itu yang memenuhi standar internasional hanya 3%. Yang lainnya hanya bentuk server.

Nah sejalan tadi yang dilaporkan oleh Pak TBH dan rekan-rekan lain, Ibu Christina juga tadi, bagaimana Undang-undang PDP ini akan memiliki konsekuensi terhadap pembangunan Pusat Data Nasional. Karena dalam Pusat Data Nasional ini, ya itu tadi, ada 3% yang hanya memenuhi standar internasional hanya 3%. Lantas didalamnya juga ada 27.400 aplikasi, walaupun nanti disederhanakan, katanya hanya ada 50 aplikasi sejenis, karena ini nanti masuk dalam kriteria interoperabilitas yang nanti akan diatur di dalam undang-undang ini. Nah apakah ini berlaku untuk yang di swasta saja, atau yang di pemerintah? Karena 2.700 data center ini, saya yakin kalau data centernya ini dibawah Kemenkominfo, pasti sudah dianggarkan dengan baik dan memiliki *road map*.

Tetapi data center yang di luar dari naungan Kemenkominfo yang ada di kementerian-kementerian lain itu, bagaimana konsekuensinya, bagaimana *road map*-nya sampai tahun 2024 itu mereka akan meng-*up grade* sesuai standar dan bagaimana interoperabilitasnya dan paling utama, bagaimana konsekuensi anggarannya? Jangan sampai kita membuat Undang-undang PDP ini, tetapi nanti tidak diturunkan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, karena data center ini adalah pengendali data.

Nah sejalan dengan itu, salah satu juga yang ada di dalam DIM, di Undang-undang PDP, bahwa, ini saya enggak tahu ini, pasal, saya lupa, Pasal 48 mungkin, bahwa badan hukum yang merupakan pengendali data yang akan menjadi kewajiban pelaku, pelaku usaha, dalam melakukan penggabungan atau merger atau mengakuisisi, nah 2.700 data center milik negara ini kan akan dijadikan satu di Pusat Data Nasional.

Di dalam DIM tersebut, itu kan belum diatur mengenai persetujuan. Persetujuan dari pemilik data, kalau misalkan digabung, diakuisisi, atau merger, itu bagaimana? Nah ini akan berakibat bahwa misalkan dari 2.700 data center ini, dilakukan pasal tersebut, bagaimana kalau misalkan ini aplikasi pengendali data publik? Misalkan ya contoh-contohnya lah, *platform* besar, tokopedia dengan gojek merger, nah itu bagaimana perlakuannya? Apakah sama, ataukah berbeda? Nah kenapa ini kami tanyakan? Tadi saya juga *me-refer* yang sempat ditanyakan oleh Bapak Sukamta. Bapak Presiden Jokowi ini mungkin memiliki visi tertentu, kenapa Kemenkominfo ini ada di Polhukam, Pak. Karena kalau misalkan kita melihat proses *merger* atau investor. Kalau kita *mindset*-nya Polhukam, pasti itu tadi, harus ada kemandirian. Tetapi kalau misalkan *mindset*-nya misalkan ekonomi digital, ini kan irisan. Irisan antara Parekraf dengan Kominfo. Kalau kita *mindset*-nya Parekraf, memang dia butuh investor. Tidak masalah, misalkan pengendali data yang besar, gojek, itu di luar negeri, itu tidak masalah, investor. Tetapi kalau kita *mindset*-nya Kemenkopolkam, ini adalah kedaulatan. Nah, tidak ada salah, tidak ada benar di sini Pak, hanya *road map* kebijakan di ekonomi digital misalkan contohnya ini, terkait dengan Undang-undang PDP. Ini yang kami ingin tanyakan, oleh karenanya *road map* mengenai Pusat Data Nasional ini mungkin perlu menjadi satu cluster khusus untuk disinergikan dengan tim di Panja Undang-undang PDP. Termasuk yang itu tadi, interoperabilitas, itu kan ada 50 aplikasi sejenis dari 27.400 aplikasi. Nah ini semua kan sudah disampaikan oleh Pak Bambang Dwi Anggono ke media, inilah yang akan kita tindak lanjuti.

Lantas yang kedua, terkait dengan banyaknya pertanyaan dari publik juga terkait soal *whatsapp*, *facebook*, dan aplikasi-aplikasi dari luar negeri. Nah dari Kemenkominfo, ini yang tadi saya tanyakan di awal, karena kan di bawah Kemenkopolkam. Berbeda dengan pengembangan ekonomi digital di Kementerian Pariwisata. Nah terkait hal ini, apakah Kemenkominfo memiliki *road map* untuk pengembangan *software* aplikasi lokal? Ya baik yang *chatting-chatting*, *search engine*, atau komunitas, atau seperti *apps-apps* aplikasi digital. Atau memang pasrah saja lah, enggak bakal ada buatan Indonesia, pakai saja *whatsapp* atau *facebook*. Karena ini Pak, paling tidak kita ingin memastikan di Kemenkominfo itu ada mata anggarannya atau tidak? Kalau tidak ada mata anggarannya, berarti kebijakannya *in line* ya, diserahkan kepada publik. Berarti tidak sesuai dengan visi Kemenkopolkam, yaitu penegakan kedaulatan. Berarti kita geser ini ke Kemenparekraf. Karena ini termasuk pengembangan ekonomi digital. Nah ini yang kita ingin pastikan, sehingga dalam fungsi pengawasan kita, ini tidak salah, Pak. Kalau evaluasi tahun 2020, harusnya setiap kita rapat, kita didampingi oleh hasil laporan sementara dari BPK. Minimal dari semester 1. Tapi karena mungkin belum selesai, ini nanti kita anggap ya ini semua pasti oke-oke saja lah, kecuali ada *note* penting dari hasil laporan BPK. Oleh karenanya, terkait hal tersebut, *road map planning* pengembangan *software* aplikasi lokal, ini kita perlu pastikan ada atau tidak di Kemenkominfo.

Yang terakhir, mungkin kami perlu masukan Pak, dari Divisi Hukum dari Kemenkominfo, mengenai cluster ekonomi digital, yang kita tadi sempat sampaikan. Cluster ekonomi digital ini, bagaimana pengaturan diantara Kemenkominfo dengan Pariwisata? Karena di Pariwisata, itu juga ekonomi digital ini juga diatur. Jangan sampai fungsi pengawasan kami di Komisi I, kita memeriksa ekonomi digital ini berdasarkan *mindset* di Kemenparekraf.

Contohnya itu tadi, kalau dari kedaulatan, investor saja harusnya secara kedaulatan kita harus mandiri. Tapi kalau di sisi Parekraf, memang mereka mengundang investor sebanyak-banyaknya. Nah ini adalah 2 hal yang berbeda, sehingga norma yang kami akan terapkan dalam fungsi pengawasan legislasi kita, menjadi sesuai. Kalau tidak, akan terus ada

pertanyaan seperti Pak Kamta tadi. Kenapa kalau misalkan dari luar negeri enggak boleh? Ya kalau misalkan disampaikan, ya kalau soal yang itu, clusternya di Menparekraf, Pak. Kalau Parekraf, pertanyaan Pak Kamta tadi tidak perlu dijawab. Tetapi kalau misalkan kita *mindset*-nya adalah Kemenkopolkam, bahwa ekonomi digital, beberapa hal yang penting ini harus diterapkan prinsip kedaulatan. Bagaimana kalau prinsip kedaulatan ya sudah pasti, kalau ada pengguna aplikasi lebih satu juta ya ini enggak boleh keluar.

Atau contoh paling utama, yang ada di China. M-Group dari Jack Ma. Dia mau menerapkan prinsip keterbukaan tetapi di sisi lain, negara menerapkan prinsip yang berbeda, sehingga IPO-nya ditahan. Nah hal-hal seperti ini, kita menyamakan norma dulu Pak, menyamakan norma, sehingga fungsi pengawasan kita ya itu tadi, ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya kalau tupoksinya jelas itu sudah selesai dengan sendirinya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Bobby.

Selanjutnya, mungkin yang terakhir untuk yang fisik, Pak Yan Mandenas. Nanti dari virtual ada senior saya, Pak Effendi Simbolon.

Pak Yan, dipersilakan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Terima kasih

**Pimpinan yang kami hormati beserta seluruh Anggota Komisi I,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kominfo yang kami hormati,
Selamat juga kepada Sekjen Kominfo yang baru,**

Mungkin saya ingin mempertegas kembali beberapa penekanan yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran, karena pertumbuhan ekonomi kita, khususnya sektor komunikasi dan informatika, mengalami peningkatan signifikan, yang semula di Tahun 2019 itu kisarannya hanya 9,6% di kuartal kedua, kemudian masuk di Tahun 2021 kuartal pertama, meningkat menjadi 10,88 %. Nah ini tidak terlepas dari potensi-potensi yang ada di kita, terutama kalau kita lihat, 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dengan tingkat penetrasi 64%, Pak Menteri.

Nah kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di sektor komunikasi dan informatika, saya kembali lagi melihat penyusunan Peta Jalan Indonesia Digital, Pak Menteri. Nah saya pikir *road map* yang disusun oleh Pak Menteri dan teman-teman di Kemkominfo, saya tidak tahu sampai dengan hari ini, apakah sudah melibatkan publik, serta industri penyiaran, untuk menyusun *road map* ini, atau tidak. Karena saya pikir bahwa penyusunan *road map* ini butuh suatu integrasi program digitalisasi secara komprehensif sehingga pertumbuhan ekonomi kita di sektor komunikasi dan informatika bisa terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, sesuai dengan target dan penyusunan *road map* yang sementara ini digagas oleh Pak Menteri dan teman-teman di Kominfo.

Nah yang kedua, penyusunan *road map* ini juga akan mendukung pelaksanaan Undang-undang Ciptaker, nah sehingga saya berharap bahwa semua stakeholder harus perlu dilibatkan untuk duduk bersama dan membicarakan hal ini bersama pemerintah.

Yang berikut, terkait dengan pembangunan 4.200 BTS, nah saya pikir beberapa waktu lalu kita sudah sering membahas soal pembangunan BTS ini, ya, dari tingkat penyebaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan alokasi yang diperuntukkan oleh Menkominfo, tetapi yang perlu saya tekankan di sini, sampai sejauh mana sinergi yang sudah dibangun oleh Kominfo dengan stakeholder yang lain dalam mendukung percepatan program pembangunan BTS dan peningkatan 4G.

Nah karena yang kami temukan di lapangan, kalau tidak terjadi sinergi, maka pembangunan BTS ini juga dari aspek pemanfaatannya juga akan berjalan lambat. Sehingga kita mendapati bahwa masyarakat Indonesia rata-rata membutuhkan percepatan, begitu, *action* kita yang mereka butuhkan. Tidak lagi pada proses seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pada beberapa waktu menyampaikan pidatonya.

Nah sehingga saya pikir langkah-langkah ini, sekiranya kongkrit harus direalisasikan oleh Pak Menteri dan jajaran di Kominfo, agar sinergi untuk mendukung percepatan peningkatan pembangunan BTS dan peningkatan jaringan 4G di seluruh pelosok tanah air ini, dapat tercapai di tahun 2021 atau juga di tahun 2022. Karena sebelum kita berbicara pemerataan 4G di seluruh Indonesia, kita masuk pada 5G, saya pikir akan tumpang-tindih kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri.

Nah kemudian yang berikut, saya ingin menegaskan lagi kembali terkait dengan penanganan Covid, Pak Menteri. Penanganan Covid, saat ini kita masuk dalam program vaksinasi. Nah saya tidak tahu, sampai sejauh mana langkah-langkah strategis dari Kemkominfo untuk bersinergi dengan potensi-potensi lokal yang tentunya akan mampu mengaplikasikan kebijakan pemerintah ya, dan juga melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah, agar masyarakat kita sadar dalam menjalankan protokol kesehatan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan vaksin.

Nah karena langkah-langkah yang kita dapatkan di lapangan ini, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin, satu, dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nah rata-rata masyarakat di luar kota. Nah itu mayoritas masih banyak yang tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Yang kedua, soal vaksinasi ya, vaksin ini kan berbagai kontroversi dan informasi media yang menimbulkan masyarakat juga sedikit bertanya, ini vaksin ini antara kita mengikuti arah kebijakan pemerintah atau ragu-ragu untuk tidak mengikuti.

Nah harapan saya, Pak Menteri saat ini dalam situasi pandemi Covid-19, sangat mengambil peran penting untuk memaksimalkan semua sumber daya yang ada, agar kita bisa mendorong percepatan pelaksanaan program vaksinasi nasional dan pelaksanaan protokol kesehatan sampai ke tingkatan yang paling bawah, dengan memberdayakan potensi-potensi lokal tadi. Nah saya tidak tahu pada Tahun 2020, berapa besaran anggaran yang sudah terserap untuk pelaksanaan kebijakan Kemkominfo dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan Tahun 2021.

Pertanyaan saya, berapa alokasi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi dan program sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat, sehingga kita bisa mencegah lajunya peningkatan Covid-19 di tanah air.

Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sebagai substansi dari materi rapat kita pada kesempatan hari ini.

Dan yang terakhir Pak Menteri, terakhir saya mendapat pengaduan dari beberapa teman-teman eks karyawan media cetak ya, antara lain Tempo, Jawa Pos Group, kemudian The Jakarta Post, dan juga media siber, Kumparan. Nah akhir-akhir ini terjadi PHK besar-besaran di 4 media yang saya catat, saya tidak tahu kalau yang lain, tetapi sampai dengan hari

ini, pelaksanaan dari pada PHK yang dilakukan tidak mengikuti amanat Undang-undang Tenaga Kerja, untuk memberikan kompensasi dari proses PHK yang dilakukan.

Nah oleh sebab itu saya ingin untuk ada intervensi pemerintah untuk membantu para sahabat dan teman-teman kita, yang bekerja sudah sekian puluh tahun di media, tetapi pada saat mereka di PHK, mereka tidak dihargai hak-haknya yang harus mereka terima, sampai dengan hari ini. Dan saat ini pengaduan sedang dilakukan ya, melalui provinsi terkait ya, tapi juga melalui mitra-mitra yang mereka ingin untuk bisa mendapat terhadap hak-haknya.

Nah saya pikir hal ini juga tidak sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Ciptaker yang sudah mengatur masalah hak-hak dari karyawan. Saya pikir ke depannya, mungkin butuh perhatian Pak Menteri untuk melakukan verifikasi kembali terhadap izin-izin dari media yang beroperasi, baik cetak maupun elektronik. Sehingga ke depannya jangan sampai mereka melakukan PHK secara sepihak, dan tidak memperhatikan hak-hak dari karyawan tersebut.

Nah ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sekaligus meminta tanggapan dari Pak Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Yan.

Ini yang terakhir di yang hadir fisik. Kita akan mencoba menghubungi ke senior saya, Pak Dr. Effendi Simbolon. Bapak Effendi, silakan. Oh ya, baik, baik, Pak.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Selamat Siang, Pak Effendi.

Selanjutnya kami persilakan kepada senior saya juga ini, Pak Darizal Basir, waktu kami persilakan, Pak Darizal.

F-PD (H. DARIZAL BASIR, S.SOS., M.B.A.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Mohon maaf Pak Darizal, suaranya belum kedengaran. Saya minta diulangi lagi, kalau boleh.

F-PD (H. DARIZAL BASIR, S.SOS., M.B.A.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

F-PDIP (DR. H. HASANNUDIN, S.E., M.M., M. Si):

Saya pangling Bang, pangling, jenggotnya dan kumisnya ini.

F-PD (H. DARIZAL BASIR, S.SOS., M.B.A.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih abangda.

Saya kira masih ada yang lain, yang virtual?

Mas Taufiq? Ya silakan, Mas Taufiq.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Walaikumsalam Warahmatullahita'ala Wabarakaatuh.

Saya kira Pak Taufiq ini yang terakhir ya, yang virtual masih ada?

Saya kira tidak ada, terima kasih.

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR-RI yang telah banyak memberikan tanggapan-tanggapan serta pertanyaan-pertanyaannya pada rapat kerja kita di hari ini.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Kominfo untuk menjawab, menanggapi, tadi semua tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya kira banyak sekali, tapi mohon dijawab dengan cara di-*cluster*, saya kira bisa di satu-satukan, karena ada beberapa pertanyaan yang saya kira berulang, ya kan?

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, tentu saya memberikan apresiasi yang tinggi sekali dan teramat tinggi kepada yang terhormat anggota DPR-RI, karena dari pendalaman-pendalaman, pertanyaan, penjelasan, klarifikasi, memberikan kesan pada saya bahwa tugas pokok dan fungsi Kominfo sangat dipahami secara dalam, dan program-programnya pun sangat dipahami secara dalam.

Saya sepaham dan sepakat dengan Pimpinan tadi, dikategorikan di dalam cluster pertanyaan-pertanyaan, karena banyak yang serupa. Saya mulai dari yang paling sulit dulu.

Yang paling sulit itu adalah 5G. Saya perlu perlu tekankan disini bahwa pelelangan spektrum frekuensi 2,3 giga tidak ada hubungannya dengan *deployment* 5G. Jadi berita-berita yang disebar atau yang disampaikan di media, belum sepenuhnya menggambarkan apa yang ada di dalam perencanaan Kominfo. Pelelangan spektrum frekuensi 2,3 adalah untuk menambah dan melengkapi kebutuhan operator seluler akan keperluan spektrum demi pengembangan usaha mereka, termasuk untuk pemanfaatan 4G. Dan pada saatnya bila nanti

dibutuhkan untuk 5G, silakan. Jadi ini untuk kepentingan operator selular. Pelelangan 2,3 giga spektrum frekuensi juga ..., itu tidak seluruhnya 2,3 itu bebas secara nasional. Kementerian Kominfo mencatat bahwa di frekuensi 2,3 giga ada aplikasi atau pemanfaatan telekomunikasi lain. Sehingga dalam rangka untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara lainnya berupa PNB, maka frekuensi spektrum 0 di rentang 2,3, giga yang lowong. itulah yang dilelang untuk kepentingan operator selular. Pelelangan itu tidak dibatalkan. Sekali lagi, pelelangan itu tidak dibatalkan, tetapi dilakukan pelelangan ulang demi akuntabilitas dan transparansi, pelelangannya itu sendiri. Akuntabilitas, *prudent* proses, itu yang diperhatikan, dan untuk memperhatikan optimalisasi dan maksimalisasi penerimaan negara. Jadi tidak ada hubungannya antara *rebidding* atau pelelangan ulang spektrum frekuensi 2, 3 dengan *deployment* 5G.

Yang kedua, *deployment* 5G di Indonesia dan di negara manapun juga, itu dilakukan oleh operator selular, bukan oleh teknologi provider. Dan karenanya tidak perlu kita khawatirkan bahwa jika 5G diterapkan di Indonesia, akan didominasi oleh teknologi provider. Tetapi kalau itu dilakukan di Indonesia, maka *deployment* 5G dilakukan oleh operator selular yang mempunyai hak lisensi pemanfaatan spektrum frekuensi sebagaimana yang diberikan oleh Kominfo. Dan spektrum frekuensi 5 G berbeda atau beberapa spektrum tertentu yang dibutuhkan untuk 5G ada di semua level *band*, di *low band*, 700, 800, 900, di *medium band* 2,3; 2,5; 2,6; 3,3; 3,5, dan di *super data layer*, di 26, 27, 28, dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungannya antara 5G dan pelelangan 2,3 giga.

Yang ketiga terkait dengan 5G, Indonesia menganut paham pemanfaatan teknologi yang tidak berpihak kepada kepentingan teknologi manapun juga selain kepada kepentingan negara dan kepentingan masyarakat Indonesia saja yaitu dalam hal pilihan teknologi yang *capital expenditure*-nya yang paling kompetitif dan *operational expenditure*-nya yang paling efisien, itu akan menjadi perhatian kita di dalam *deployment* 5G.

Yang keempat, *deployment* 5G berbeda dengan *deployment* 4G. *Deployment* 5G untuk Indonesia tidak mungkin dilakukan secara serentak secara nasional, karenanya yang disampaikan program 5G adalah inisial *show case deployment* 5G yang sedang kita bicarakan dan bahaskan. Sebagai *showcase* itu dilakukan di mana? Bisa saja itu dilakukan di industrial estate, bisa saja itu dilakukan di kota-kota mandiri, kota satelit, bisa saja itu dilakukan di pusat-pusat pariwisata yang ekosistem 5G-nya sudah tersedia. Jika itu tidak tersedia dan keekonomiannya kurang, operator selular pun tidak akan melaksanakannya. Jadi tidak ada konflik kepentingan antara 4G dan 5G atas atau tidak ada kepentingan, konflik kepentingan bagi operator selular atas *deployment* 4G maupun 5G.

Yang kedua, Pusat Data Nasional. Sudah disampaikan tadi bahwa yang tahap ini yang disiapkan oleh Kominfo adalah yang sudah dilaksanakan adalah *land acquisition*, pengadaan lahan. Pengadaan lahan yang sudah tersedia di 1 titik pusat data nasional pemerintah, dari pusat data nasional ini pusat data nasional pemerintah, ya, itu di Jakarta. Dan Kominfo mempertimbangkan agar pusat data nasional tidak saja di 1 lokasi, tapi di beberapa lokasi ya, dalam rangka menjaga *redundancy*, *redundancy*-nya, jadi ada di Jakarta, bisa saja ada di Batam, bisa saja ada di ibu kota negara baru, ya di mana nanti akan dipertimbangkan yang paling efisien dalam rangka *traffic*-nya data untuk kepentingan Indonesia dan keamanan data itu sendiri. Terkait dengan data ini yang persyaratannya tidak gampang, persyaratan yang pertama, dia harus memenuhi persyaratan tersedianya *redundancy power supply*, tersedianya akses-akses *road*, jalan-jalan yang memudahkan terjaganya *security system* yang baik dari sisi keamanan dan pasti dari bahaya gempa dan banjir. Makanya di dalam membangun pusat data nasional, data-data dan riwayat lokasi itu diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena data itu sendiri akan menjadi satu,

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pimpinan, Pimpinan,

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Baik Pak Effendi, baik, silakan.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Alasannya semata-mata administratif Pak, administratif, karena kita Kominfo harus memenuhi syarat-syarat administratif dalam rangka akuntabilitas proses pelelangannya. Saya tidak bisa disampaikan secara terbuka di sini, karena pelelangan sedang berlangsung Pak, mohon maaf itu.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Kenapa enggak bisa? Kita kan ingin tahu, kenapa kok kemudian keputusannya di *re-tender*, begitu lho.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Keputusannya di *re-tender*, karena administrative, tidak ada acuan di situ berapa harganya. Kalau mau spesifik, spesifik.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Kalau mau dijelaskan saja, kita ini juga ... dibuka juga, jangan kemudian ... (suara tidak jelas).

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Silakan Mas Taufiq.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Silakan dijawab dulu, Pak Menteri ya.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Kalau dibahas secara tertutup, boleh, tidak ada masalahnya.

Kami sangat terbuka, justru dalam rangka akuntabilitas proses pelelangan ini dilakukan *rebidding*. Ini betul-betul, dan administratif sangat penting terkait dengan pelelangan untuk kepentingan barang atau aset yang dikelola oleh negara.

Selanjutnya terkait dengan pusat.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Ya silakan.

F- ... (...):

.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Ya terserah, kalau rapatnya rapat kerja tertutup, juga kami tidak ada masalah, asal tertutup.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara kurang jelas terdengar)

... kebijakan Pemerintah itu bisa jelas, begitu, ukurannya. Mau tertutup, mau di mana, mau di ruang ... kita bicara? Ya ini kayaknya Pak Menteri ragu-ragu menyampaikan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Saya tidak ragu-ragu Pak Effendi, kalau mau tahu persisnya, ya, yang terkait dengan besarnya penerimaan negara, kalau tidak secara spesifik tertera di situ tentu pemerintah tidak bisa menetapkan siapa pemenang lelangnya untuk ditindaklanjuti. Kita harus memastikan prosedur-prosedur administratif itu betul-betul terpenuhi. Kalau perlu nanti secara khusus untuk disampaikan lebih detil, saya nanti siapkan.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Effendi.

Saya kira silakan dijawab Pak Menteri, bagaimana jalan tengahnya.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Ya, saya kira apa namanya, saya sudah menjawabnya. Dan sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan penandatanganan MoU kek, MoA, 5G *deployee*, enggak ada hubungannya. Ini tender pelelangan dalam kaitan dengan penerimaan negara bukan pajak, pemanfaatan spektrum frekuensi yang *available* yang tersedia di Indonesia yang di 2,3 giga itu. Jadi itu program yang sangat terpisah, tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin kebetulan terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Jadi saya bisa memahami juga, saya kalau duduk disebelah sana, saya bertanya yang sama. Pertanyaannya sama, begitu, Pak Effendi.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

Mungkin saran saya, kalau memang itu, kepada Pak Menteri, kalau memang itu bukan rahasia negara, saya kira bisa juga dipaparkan disini. Kecuali hal yang bersifat sangat rahasia, mungkin perlu kita bicara khusus atau tertentu.

Demikian Pimpinan, saran, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Sturman.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Baik, terima kasih Pak Effendi Simbolon yang memberikan dukungan yang kuat atas perannya Kominfo. Saya setuju sekali itu.

Selanjutnya kalau bisa saya teruskan secara singkat masalah pembangunan data itu, memang betul saat ini adalah 2.700 pusat data pemerintah, ya, pusat data pemerintah. Dan pasti ada ribuan pusat data non pemerintah. Dari 2.700 pusat data pemerintah itu betul hanya 3% yang memenuhi global standar, ya. Dan banyak sekali yang bahkan dilakukan secara sirkuit tertutup atau terbatas, sehingga sulit sekali dalam rangka konsolidasi interoperabilitas, *cleaning, cleansing* data, dalam rangka menghasilkan Satu Data Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun Satu Pusat Data Pemerintah. Ya, Pusat Data Pemerintah, tidak ada hubungannya juga dengan pusat-pusat data pihak swasta. Ya silakan pihak swasta membangun pusat datanya. Tapi kalau pusat data pemerintah, dalam rangka tata kelola data pemerintah, di mana Kominfo akan membangun pusat datanya, sedangkan pengguna penggunanya adalah pemerintah.

Dan tadi sudah sampaikan, saat ini juga, pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan 24.700 aplikasi yang tidak efisien. Karenanya pada saat program pembangunan pusat data nasional, di samping konsolidasi data dengan sektor-sektor yang terkait, juga nanti konsolidasi aplikasi pemerintah dalam rangka *electronic government*. Dengan harapan bahwa dengan dilakukan seperti itu, akan terjadi efisiensi penggunaan APBN atau keuangan negara. Dan dari informasi yang saya peroleh efisiensinya cukup signifikan, ya sekitar Rp20 triliun per

tahun dan itu cukup signifikan. Saya kira itu terkait dengan pusat data, saat ini prosesnya sedang proses pembiayaan.

Tadi ditanya kenapa tidak dari APBN, kenapa itu dari bantuan luar negeri? Ya betul pusat data kita ini, ini dibiayai oleh beberapa negara, termasuk yang saat ini sedang dalam proses yang advance adalah Pemerintah Prancis. Nah Pemerintah Prancis sedang melakukan pembicaraan pembiayaannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kominfo tidak mengambil bagian didalamnya. Karena itu domain Bappenas dan Kementerian Keuangan. Lain halnya jika Kementerian Keuangan menyediakan APBN, dan Komisi I menyetujuinya, maka tentu kita tidak perlu memanfaatkan pinjaman luar negeri.

Ya tapi saat ini seperti yang disampaikan oleh Anggota DPR yang terhormat tadi bahwa pemanfaatan fiskal nasional kita masih lebih banyak diutamakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Selama pembiayaan pusat data masih bisa dibiayai dari bantuan-bantuan pembiayaan lain termasuk dari pembelian luar negeri, maka itu diusahakan. Ini sepenuhnya domain Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Secara teknis ada di Kominfo, menyangkut peralatan dan pilihan-pilihan teknologinya.

Pusat Data Nasional ini tentu akan dilengkapi dengan sistem *security* yang memadai, dan karenanya walaupun itu dibiayai oleh pembiayaan asing, spesifikasi *security system* semuanya akan dilakukan sendiri oleh Indonesia. Sehingga ya tidak kita khawatirkan bahwa karena sumber pembiayaannya asing, semua data kita akan mengalir ke asing, tidak. Saat ini payung hukum terkait dengan data ada di Undang-undang ITE, ada di PP 71 dan ada di Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020.

Jadi dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur termasuk sampai ke ruang lingkup yang sangat hilir, yaitu sosial media. Platform-platform digital sosial media yang tidak mengikuti aturannya, maka akan mendapat tindakan-tindakan, baik itu administrative, ya, maupun denda-denda termasuk sampai penutupan akses. Karenanya, maka dengan adanya Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 lebih memudahkan tata kelola ruang digital nasional kita. Sehingga ya pembicaraan dan keinginan kita agar platform digital melakukan *self monitoring* dan *self to takedown* itu dijawab dengan Permenkominfo di mana platform digital diharuskan melakukan proses takedown pemblokiran terhadap seluruh konten yang dinilai tidak sesuai atau tidak sejalan dengan perundang-undangan di mana negara yang bersangkutan.

Engga saat ini ya tadi ditanya, terkait dengan konten-konten digital, sudah disampaikan sebelumnya bahwa lebih dari 2 juta konten-konten negatif yang sudah di *takedown* oleh Kominfo. Di dalamnya termasuk perjudian, pornografi dan berbagai tindakan larangan lain. Tidak, itu termasuk hoax, hoax adalah bagian yang tidak sebanyak itu. Tetapi karena hoax memberikan dampak yang besar di dalam ruang publik, maka tentu hoax menjadi perhatian. Karena hoax menjadi perhatian, hoax lah yang dibicarakan, termasuk hoax terkait dengan vaksinasi Covid-19.

Hal lain yang dibicarakan tadi, Undang-undang PDP, ini proses pembahasan Undang-undang PDP, RUU PDP sedang berlangsung antara Kominfo dan DPR, Panja DPR-RI Komisi I, karenanya tentu saya tidak bisa menyinggung ya secara detil artikel atau pasal per pasal di dalamnya.

Namun dari sisi kebijakan, dari sisi kebijakan, Indonesia saat ini membutuhkan Undang-undang PDP untuk perlindungan data pribadi rakyat, ya. Bukan untuk pembangunan pusat data. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan pusat data. Ada atau tidak ada RUU PDP, pusat data tetap dibangun, karena itu dalam rangka *electronic government* kita. Tetapi ada dan tidak adanya Undang-undang PDP akan berdampak terhadap perlindungan data rakyat. Perlindungan data rakyat ini yang perlu kita jaga bersama. Karenanya tata kelolanya pun, ada *benchmark* di banyak negara, termasuk di banyak negara yang tetap yang menempatkan data pribadi berada dibawah kementerian sebagai regulator. Demikian halnya *benchmark* RUU PDP yang disampaikan kepada DPR juga mengacu pada negara-negara

dengan sistem yang sama dan mempunyai kemampuan untuk perlindungan data pribadi rakyat.

Yang berikutnya *roadmap digital*. *Roadmap digital* memang sedang kita susun, saat ini baru disusun dan sedang disampaikan, tentu ada saatnya nanti kita bicarakan dalam sesi yang lebih apa namanya, lebih khusus, agar bisa dibicarakan secara lebih detil terkait dengan *roadmap* itu. Saat ini prosesnya sedang berada atau dalam proses menuju ke laporan kami ke istana. Sehingga saya tentu tidak bisa mengomentari secara detil keseluruhannya. Yang pasti bahwa digitalisasi Indonesia seperti awal yang disampaikan, tidak akan terlepas dari yang pertama, untuk menyelesaikan *deployment* infrastruktur TIK-nya terlebih dahulu. Kita sudah membangun *backbone* telekomunikasi kita, termasuk di situ penggelaran fiber optik. Seperti yang disampaikan, fiber optik di Indonesia saat ini seluruhnya panjang fiber optik di darat dan di dasar laut adalah 348.000 kilometer. Dua belas ribu di antaranya dibangun oleh pemerintah. Dua belas ribu dibangun oleh BAKTI, yang disebut dengan tol, Palapa Ring. Yang disebut dengan Palapa Ring. Palapa Ring adalah 12.000 km panjang dari 348.000 km panjang fiber optik yang ada di Indonesia yang dibangun oleh berbagai ekosistem di dalamnya. Termasuk tentu yang terbanyak adalah oleh operator selular.

Yang berikutnya terkait dengan digitalisasi pertelevisian. Betul sekali, ASO, *switch off*, akan terjadi pada 2 November Tahun 2022, sehingga kerjasama seluruh pihak secara bersama-sama untuk memastikan bahwa digitalisasi diawali sepenuhnya pada 2 November 2022.

Ada pembicaraan-pembicaraan dilakukan terus-menerus antara Kominfo dengan industrinya. Baik LPP maupun LPS dan lembaga penyiaran lokal. Bagaimana menanganinya? Saat ini tahapannya setelah itu di disahkannya Undang Undang Cipta Kerja sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, saat ini dalam tahapan akhir mempersiapkan RPP rencana peraturan pemerintah. Yang saya kalau tidak salah, pagi ini baru dimasukkan ke kantor Menko Perekonomian. Dan itu tentu sebagaimana amanatnya undang-undang, melibatkan keseluruhan komponen masyarakat melalui testimony-testimoni publik, uji-uji publik dan berbagai saran pendapat, tidak saja pendapat dari dalam negeri, tetapi juga pendapat-pendapat dari dunia internasional, ya dari mancanegara, dari multi stakeholder yang ada.

Banyak yang bertanya, tadi terkait dengan penyimpangan yang terjadi dalam ruang digital. Dapat saya sampaikan bahwa kriminalisasi *cyber crime* di bidang *financial technology* apa *fintech*, *financial technology*, *fintech* tidak berada di bawah Kominfo, ya, tetapi berada di bawah otoritas jasa keuangan. Kominfo selalu akan membantu OJK, ya, jika terjadi kriminalisasi atau indakan kriminal di bidang *fintech*.

Kominfo bekerjasama dengan Kepolisian RI dalam rangka penegakan hukum di ruang fisik. Jadi kalau ada tindakan kriminal ruang digital, maka komunikasi antara Kominfo dengan Bareskrim Polri ya untuk melakukan penegakan hukum di ruang fisik, sehingga sejalan penegakan hukum di ruang digital yang dilakukan oleh Kominfo dalam penegakan hukum di ruang fisik yang dilakukan oleh Polri. Namun ya terhadap hal-hal yang sangat teknis di bawah undang-undang sektor yang secara khusus seperti Undang-Undang Sektor Keuangan dan Perbankan, maka yang mempunyai kewenangan dan ini menjadi domain sepenuhnya otoritas jasa keuangan. Demikian halnya yang terkait dengan moneter, berada di bawah bank Indonesia.

Dapat saya sampaikan juga bahwa memang betul ada 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia 70.760 diantaranya telah mendapat *coverage* sinyal atau 4G, 3G sinyal, mungkin ada juga yang 2G sinyal. Jadi masih tersisa 12.548 desa dan kelurahan yang sama sekali belum terlayani dengan internet atau *blankspot*.

Banyak pertanyaan tadi ya, kategori, sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa ada 9.113 desa atau kelurahan berada di wilayah 3T. Yang berada di wilayah 3T itu menjadi tugas dan fungsinya Kominfo, BL BAKTI Kominfo, sehingga penganggarannya

yang tersedia adalah dalam rangka pembangunan infrastruktur TIK atau BTS di wilayah 3T. Dan tersisa 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non 3T atau wilayah komersial. Terhadap 3.435 desa ini atau kelurahan ini, kami telah melakukan pembicaraan dengan operator selular untuk meminta kepada operator selular secara simultan menyelesaikan pembangunan BTSnya, agar ditahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah terlayani dengan sinyal 4G, setidaknya.

Nah untuk itu dapat saya sampaikan bahwa operator selular menyampaikan spirit yang sama dan komitmen yang sama untuk bersama-sama menyelesaikan pembangunannya. Namun karena ini operator selular, dan ada *capital expenditure* yang harus dikeluarkan dan jumlahnya cukup signifikan, dan terus secara internal korporasi harus melalui tahapan-tahapan internal di dalam korporasinya masing-masing. Tapi komitmennya telah diberikan dan kami memegang komitmen itu, sehingga pada saat nanti pembangunannya itu dilakukan oleh BL BAKTI Kominfo selesai, di saat yang bersamaan diharapkan ya oleh operator selular juga selesai. Karena pembangunan ini BTS, maka kerja sama antara Bakti Kominfo dan operator selular akan berlangsung terus, tidak berakhir di pembangunan itu saja, karena ini terkait dengan penempatan elektronik *portion*-nya pada BTS-BTS pasif yang dibangun oleh Bakti Kominfo.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Ya silakan dari siapa nih? Pak Effendi, silakan.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Pak Effendi, mohon maaf ini sinyalnya jelek, jadi kurang begitu kopi disini. Kalau bisa mohon diulangi lagi yang singkat. Tidak terkopi tadi.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Ya saya pada prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Effendi, bahwa kerjasama-kerjasama dilakukan sekarang harus berorientasi jangka panjang, karena semuanya ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Periodisasi pemerintahan kita yang per 5 tahun dapat berganti, mudah-mudahan tidak mengakhiri komitmen pembangunan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Karena ini kerjasama ini adalah demi kepentingan penyediaan akses internet untuk kepentingan masyarakat.

Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa internet sekarang itu sudah, atau kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu sudah infrastruktur dasar di mana masyarakat membutuhkannya. Sehingga diharapkan kerjasama antara BTS yang *expenditure*

capitalnya sangat besar oleh Kominfo, oleh pemerintah, itu dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam rangka tata kelola selanjutnya untuk menghadirkan sinyal, sinyal aktif.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Saya setuju dengan Pak Effendi, ya perlu ada suatu payung hukum yang kuat untuk menjaga ini, tidak saja perjanjian di antara pihak swasta dan pemerintah, tapi kalau dibutuhkan memang harus ada payung hukum yang lebih kuat. Apa bentuk payung hukumnya, tergantung. Seperti misalnya di zaman Orde Baru ada yang disebut dengan Garis Besar Haluan Negara. Nah Garis Besar Haluan Negara itu mau di tempatkan di tingkat undang undang atau mau di tempatkan di tingkat undang undang dasar, itu adalah pilihan politik. Dan saya kira saat ini Kominfo tidak dalam kapasitas untuk menentukan pespektif politiknya. Karena apa? Hari ini saya lebih kepada hal hal yang sangat teknis yang bukan kebijakan-kebijakan politik lainnya, terkait dengan regulasi.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Ada fraksi, Pak Effendi, melalui fraksi barangkali lebih tepat dan lebih lebih tokcer itu kalau dia masuknya melalui fraksi, Pak.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)

.... walaupun sekarang Kominfo bekerja keras, membangun ... nya ini, lalu kalau ternyata di tengah jalan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Setuju Pak, nanti kita bicarakan terpisah barangkali ya, karena legislasi kan proses ya.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Pak Menteri yang Kami hormati,

Mengingat Komisi I ini masih juga akan melaksanakan rapat yang sama di tempat yang sama, jadi kami mohon untuk penjelasan singkatnya atau jawaban singkatnya, diefisiensikan lagi, dan kami berharap paling lambat 15 menit sudah selesai dan kita akan menuju ke tahap berikutnya.

Terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya kira saya sudah sampai di akhir juga, hanya ada beberapa barangkali yang perlu saya sampaikan.

Secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa Kominfo fungsinya adalah regulator, dalam kaitannya dengan digital ekonomi dan digital teknologi. Ya karena dia Kominfo bukan eksekutor.

Dibidang *downstream* atau hilir digital ekonomi seperti Kementerian Parekraf, memang menjadi domain eksekutor. Karena ya kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Parekraf menjadi penting, karena cluster digital ekonomi berada di dalam ruang kegiatannya regulasi ya dan pilihan teknologi di Kominfo serta implementasi eksekusi ekonomi digital ada di Parekraf. Nah, kerja sama itu perlu dibangun dan beberapa waktu yang lalu, Menteri Parekraf yang baru, Pak Sandiaga Uno, telah mengunjungi saya, Kominfo, dan kami berdiskusi banyak bagaimana peran Kominfo dan peran Parekraf untuk dipertemukan di satu titik sinergi.

Terkait dengan *security system* atas perlindungan data pribadi, kita semua sama sama tahu bahwa ada lembaga negara di Indonesia yang disebut BSSN, yang mempunyai fungsi penting untuk memastikan dan menjaga IT Security System atau ITSE dan semua *security sistem* yang ada selalu harus dilakukan melalui proses *assessment* oleh BSSN. Termasuk ya *security system* bagi platform-platform digital dan *market place* yang ada di Indonesia saat ini.

Saya kira itu Pak Pimpinan yang dapat saya sampaikan secara umum. Ada beberapa hal nanti barangkali yang secara spesifik, untuk bisa kami sampaikan secara tertulis melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat.

Yang terakhir, barangkali dapat kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur TIK yang tadi ya bisa dikatakan capaian tahun 2020 yang hanya 1.209, apakah mungkin di tahun 2021 untuk membangun 4.200 BTS dan di tahun 2022, 3.704? Dapat saya sampaikan, bukan kendala pada manajemen dan pilihan teknologi, tapi semuanya berkendala sebenarnya bergantung pada ketersediaan pembiayaan. Karena pemerintah telah mempunyai komitmen untuk melakukan pembiayaan melalui APBN yang juga disetujui bersama-sama dengan DPR, maka kami meyakini bauran pembiayaan atau *blended financing* untuk pembangunan seluruh 9.113 BTS untuk kepentingan 9.113 desa dan kelurahan dapat dilakukan dengan baik, melalui sumber pembiayaan APBN yang tahun ini dianggarkan Rp16,1 triliun, yang semula Rp16,8 triliun. Tapi karena ada refocusing Rp800 miliar lebih, Rp860 miliar, dan *Universal Service Obligation Fund* atau dana dari USO, serta yang saat ini sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, pemanfaatan sebagian PNBK Kominfo untuk membiayai, melengkapi pembiayaan pembangunan BTS di wilayah 3T.

Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan Pimpinan.

Selanjutnya nanti pertanyaan yang sangat spesifik bisa kami sampaikan secara tertulis.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Walaikumsalam Warohmatullahita'ala Wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Menteri, atas penjelasan lebih lanjutnya.

Sekarang kita akan bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja kita pada hari ini, Senin 1 Februari Tahun 2021, yang kita siapkan sebagai berikut. Mohon untuk di teliti bersama-sama.

Draft kesimpulan Rapat Kerja atau Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Senin 1 Februari 2021.

Yang pertama, Komisi I DPR-RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam (Kemkominfo) tahun anggaran 2020, realisasi anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2020 serta rencana program kerja Kemkominfo tahun anggaran 2021. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR-RI mengapresiasi capaian kinerja Kemkominfo tahun anggaran 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja Kemkominfo terus ditingkatkan di tahun mendatang.

Saya kira sepakat ya?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pak izin pak, jadi bukan tahun mendatang, Tahun 2021 saja tulisannya itu.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Yang mana?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Yang terakhir itu, "di tahun mendatang" itu kan enggak jelas "mendatang".

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Ya, "2021",

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Top, itu top.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Sturman, kita setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua, Komisi I DPR-RI telah mendengarkan penjelasan perubahan alokasi pagu anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan *refocussing* APBN surat Menkeu Nomor S-30/MK.2/2021 yang semula sebesar Rp16.958.777.950.000,00 Rp16.098.451.886.000,00. Untuk selanjutnya Komisi I DPR-RI mendorong Kemkominfo untuk

mengimplementasikan APBN tahun anggaran 2021 secara efektif, efisien transparan, dan akuntabel sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Saya kira setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Yang ketiga, Komisi I DPR-RI mendorong Kemkominfo untuk melaksanakan program-program strategis di Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- a. penyelesaian pembuatan peta digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan TIK berbasis digital di era 4.0, penanganan pandemi Covid-19 serta pelaksanaan *analog switch off* (ASO) di tahun 2022 sejalan dengan pengesahan Undang-undang tentang Cipta Kerja.

Yang satu, enggak ada masalah? Pak Sturman, ada koreksi yang a? Yang b?

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Kita lihat dulu, mana tadi yang a., “penyelesaian pembuatan peta jalan digital”

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

“Jalan digital”, ya?

Terima kasih, Pak Menteri.

“Penyelesaian pembuatan peta jalan digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan TIK berbasis digital di era 4.0, penanganan pandemi Covid-19 serta pelaksanaan *analog switch off* (ASO) di Tahun 2022, sejalan dengan pengesahan Undang-undang tentang Cipta Kerja”.

Nomor,

- b. pembangunan infrastruktur TIK khususnya di wilayah 3T termasuk di lokasi satuan tugas pengamanan perbatasan NKRI.

Ya saya kira sudah masuk pada b.

Yang,

- c. penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih optimal terkait program vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, sehingga meminimalkan penyebaran berita hoax terkait program tersebut.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Oke.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Saya kira oke.

Nomor,

- d. sinergitas yang lebih solid antara pemerintah dan Komisi I DPR-RI dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan pada Tahun 2021.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Bisa lebih spesifik enggak, ini Pak Ketua?

“bisa diselesaikan pada kuartal pertama Tahun 2021”, kalau bisa.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Bagaimana Pak Sturman, sanggup?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya sebenarnya sependapat sekali dengan Pak Menteri ya, tapi yang awal itu Pak Menteri, “sinergitas” itu belum terbentuk.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Kalau sinergitasnya itu kan proses, proses dialogis, ya? Tapi kalau kuartal pertama, itu target. Jadi kalau Komisi I dan Kominfo punya target kuartal pertama, jadi barang Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi begini, Pimpinan.

Kepada Pak Menteri,

Kemarin juga disampaikan, ada peraturan di DPR ini Pak, bahwa paling lama 3 masa sidang, pembahasan 1 rancangan undang undang, nah apa, paling lama. Tapi apabila tidak, maka dia masuk lagi pada, dikeluarkan dari daftar prioritas prolegnas. Sehingga Bapak katakan 1 kuartal itu sebenarnya sudah pas banget. Ini yang dimasuk kedua nih Pak? Apalagi sekarang masa sidang ini pendek sekali, sampai tanggal 10. Nanti masa sidang ketiga berikutnya untuk pembahasan ini, kalau tidak selesai, berarti nanti akan dikeluarkan dari prolegnas.

Sehingga makanya kenapa saya tekankan tadi sinergitas ini? Perlu, supaya kita tidak kehabisan waktu. Kemarin diminta teman-teman juga untuk lebih membahas secara detail lagi Pak. Jadi ini jadi saya setuju dengan Bapak yang katakan kuartal 1. Sebenarnya 1 kali masa sidang lagi, Pak. Nanti habis masa sidang ini kan tanggal 10 ya Pimpinan?

Nah berikutnya kita masa sidang 1 lagi. Saya enggak tahu nanti masa sidang berikutnya yang ke berikutnya ini sampai ke berapa terakhirnya. Di situlah harus sudah diparipurnakan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Silakan Pak.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Saya semangatnya sama, bahwa undang-undang ini penting untuk kita selesaikan. Saya memperhatikan betul bahwa Undang-undang MD3 dan Tata Tertib DPR yang mensyaratkan proses pembahasannya yang diatur. Dan di sisi yang lain, kebutuhan masyarakat akan pentingnya undang-undang ini menjadi perhatian kita bersama. Dan saya yakin Komisi I DPR-RI mempunyai pendapat yang sama bahkan lebih kuat ya, karena memperhatikan data-data masyarakat yang adalah penghuni daerah pemilihannya atau yang menentukan suara dari pemilihan kita masing-masing.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pak Menteri.

Tapi saya kira melihat kondisi yang ada, kita tetapkan saja “segera disahkan pada tahun 2021”, ya?

Nomor,

- e. mengenai pembangunan Data Pusat Nasional sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kedaulatan dan keamanan data serta memastikan tidak ada intervensi dari negara asing.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Cocok.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Cocok?

Yang terakhir ini Pak Menteri, belum sempet tadi dibahas dijawab, tapi saya kira saya masukan aja di sini, karena kebetulan kemarin saya menerima pengurus Orari ini bersama Pak Sturman. Bagaimana nih? Saya minta masukan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Tidak ada masalahnya. Dari sisi memang tata aturan pembuatan peraturan menteri, perlu pelibatan public, termasuk Orari di dalamnya. Jadi kalau Orari ingin mengambil bagian di dalam diskusi revisi terhadap Permenkominfo Nomor 17 tahun 2018, tentu dengan senang hati, menentukan masukan-masukan yang lebih baik.

Yang dibicarakan adalah agar aturan-aturan itu, tata kelola di dalam pelaksanaannya, bisa dilakukan dengan baik, agar pemanfaatan spektrum frekuensi baik oleh Orari maupun oleh organisasi atau penyelenggara-penyelenggara di luar Orari yang belum terdaftar di Orari,

dapat dilakukan manajemen dan tata kelola yang baik. Sehingga, spektrum frekuensi ini sederhana, Pak. Kalau tidak diatur dengan baik dan dia bertabrakan dengan layanan-layanan publik berbahaya lainnya, maka itu bisa berdampak bahaya.

Sebagai contoh, spektrum frekuensi penerbangan, ya bisa interferensi dengan spektrum frekuensi *internet service provider*. Apalagi kalau ada radio-radio amatir atau radio-radio tidak terdaftar yang menggunakan frekuensi yang sama, yang bisa terjadi interferensi dan membahayakan keselamatan penerbangan atau membahayakan keselamatan dan keamanan komunikasi lainnya, seperti operator selular. Sehingga pembuatan dan pelibatan masyarakat secara luas termasuk Orari dalam penentuan Permenkominfo sangat diharapkan sangat diharapkan. Tapi di satu titik tertentu, keputusan harus diambil, ya tidak bisa memuaskan semua pihak, karena untuk kepentingan layanan publik, publik-publik lainnya perlu kita perhatikan juga.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Jadi poin f ini Pak Menteri tidak keberatan, ya?

Ya, terima kasih.

Kalau begitu rancangan kesimpulan nomor 3 saya ketok, disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Program 5G belum ada.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Pak Menteri, dijawab yang Pak Effendi itu.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

(secara virtual, suara tidak terdengar)

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Baik, Mas Effendi, terima kasih.

Coba kita dengarkan dulu pendapat Pak Menteri seperti apa.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Five G baru di dalam rencana kita, belum diimplementasikan. Dan 5G masih dalam *showcase*. Pilihan teknologi 5G kita belum tahu yang mana, belum ada penetapannya. Ini baru rancangan awal.

Namun demikian, niat baik Pak Effendi untuk memasukkan ini sebagai komitmen *deployment* 5G di Indonesia dengan lebih bertanggung jawab, kami setuju. Tinggal draftnya seperti apa, bunyi kesimpulannya.

Apa ada usulan dari Pak Effendi, barangkali?

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Di *copy*, Pak Effendi?

Mungkin usulan Pak Effendi seperti apa, untuk kita nanti mesti bahas, sama-sama bahas di sini?

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Siap Komandan, kapan saja siap, Komandan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Baik, silakan Pak Menteri, kita masukkan di point g. Saja ya? Poin g.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Kalau ingin ditambah poin g. misalnya atau poin 5, "Kominfo sedang mempersiapkan implementasi *show case* 5G di Indonesia".

Yang penting kan 5G-nya, Pak Effendi, ya?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Mungkin kalimatnya dipaskan dulu, enggak perlu kita tuliskan "sedang menyiapkan Kominfo", enggak begitu kalimatnya.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Kenapa? Jangan *road map*.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Komisi I mendesak, mendorong Kominfo,

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

"Komisi I mendorong Kominfo untuk segera menyiapkan pelaksanaan *show case* 5G di Indonesia".

Ini katanya begini, Pak Effendi bilang, "Ku tahu apa yang kau mau", katanya.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Saya kira cukup dulu lah, abangda.
Yang penting kan, ... sudah terakomodir di sini.

Saya kira detailnya kita bisa bahas di rapat mendatang atau mungkin adalah penyelesaian adat, begitu. Saya kira enggak ada masalah kalau untuk keperluan bersama.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Point g.- nya tadi apa, kok dihapus lagi tadi? Mana?

Ya itu boleh itu. Cocok itu, kita lagi lagi siapkan untuk ...

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih, Mas Effendi.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan, sebelum ditutup, ada juga,

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Apalagi Pak Sturman? Silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tadi juga belum jawab dan enggak perlu, tulis juga sih ini, tentang itu Pak Menteri, intern gratis itu mana? Kok enggak muncul-muncul, setahun lebih. Kita sudah kadung janji dengan dapil-dapil loh Pak.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Jadi begini Pak, Bapak ya? Saat ini di wilayah 3T termasuk Natuna, di Natuna Tahun 2021 ini akan dibangun banyak sekali, saya tidak hapal persis angkanya, BTS. Termasuk untuk menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif kita disana. Di saat yang bersamaan, apabila ada desa ya, rumah sakit sudah semua, ya puskesmas, apabila ada desa yang untuk sementara waktu sebelum dibangun BTS-nya membutuhkan akses internet secara khusus, itu bisa disediakan. Tapi tentu tidak mungkin disediakan untuk 83.000 desa semuanya serempak. Karena apa? Penyediaan akses internet gratis ini adalah sebetulnya dia tidak gratis. Gratis oleh desa, tapi dibayar oleh APBN, karena dia menggunakan kapasitas satelit. Dan kapasitas satelit itu cukup mahal. Ya jadi secara selektif bisa kita bicarakan nanti, Pak.

Terima kasih.

Lebih cocok lagi itu Pak.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Ya, selesai, Pak Sturman? Nomor 3 kita sepakati ya? Poin 3, sudah dibaca dari atas sampai ke bawah?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang Kami hormati,

Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara rapat kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR-RI. Demikian juga kepada Pak Menteri beserta jajarannya.

Namun sebelum kami menutup rapat kerja kita pada hari ini, kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan *closing statement*-nya.

Silakan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (JOHNNY GERARD PLATE, S.E.) :

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati,

Yang pertama tentunya terima kasih atas rapat kerja hari ini, di mana banyak sekali pokok-pokok pikiran bernas yang bermanfaat bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kominfo dalam rangka mengambil bagian di dalam pembangunan nasional kita.

Kita akan bekerja beriringan, bergandengan tangan untuk memastikan rencana program Kominfo, ya, dan pengawasan yang efektif dari Komisi I dapat dilakukan dengan baik, sehingga kita bisa menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut pada waktunya.

Dan sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, tentu saya teriring doa dan harapan semoga kita bersama-sama semuanya terhindar dari Covid-19, *stay safe, stay healthy*. Jangan lupa vaksinasi sedang dilakukan oleh pemerintah, bersama-samalah kita mendorong, mendukung agar proses vaksinasi dapat berjalan lancar, dengan memberikan pemahaman, pengertian secara luas kepada masyarakat agar masyarakat mengambil bagian yang secara aktif. Sehingga kita bisa segera mendapatkan *herd immunity* atau kekebalan kelompok yang memungkinkan kita kembali dapat menggiatkan roda perekonomian nasional kita.

Dan terakhir sekali, jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Setiap waktu, secara disiplin, kita semua adalah *role model*. Apabila kita lakukan itu, maka itu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat secara umum.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Walaikumsalam Warahmatullahita'ala Wabarakaatuh.

Terima kasih untuk semuanya, untuk semangatnya, untuk komunikasinya, untuk kerja samanya.

Dan dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah*, rapat kita pada hari ini saya nyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL ... WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 1 Februari 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001